NOMOR 53

DESEMBER 2023

BAHASA DAN SASTRA DALAM GUNTINGAN

PERPUSTAKAAN BADAN BAHASA
JALAN DAKSINAPATI BARAT IV, RAWAMANGUN
JAKARTA 13220, KOTAK POS 6259
TELEPON (021) 4896558
laman:perpustakaan.badanbahasa.kemdikbud.go.id

Pembina : Sekretaris Badan
Penanggung Jawab : Kepala Subbagian Tata Usaha
Koordinator : Dwi Pudyastuti, S.Pd.
Penyusun : 1. Warso, S.Pd.
2. Edi Suyanto
Alamat Redaksi : Jalan Daksinapati Barat IV,
Rawamangun
Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 4706287/88
Laman : perpustakaan.badan.bahasa.@kemdikbud.go.id

AZHARI DASMAN DARNIS
Peminat Leksikografi dan Terminologi

Keluwesan Bahasa Daerah

Pengindonesiaan istilah asing dengan cara menyerap (dengan menyesuaikan ejaan dan lafal) tidak hanya lebih mudah, tetapi juga lebih cepat, dan satu lagi, paling memenuhi prinsip kesalingterjemahan. Prinsip ini memudahkan pelacakan bentuk asal istilah beserta makna konsepnya. Sejatinya, prinsip itu lebih untuk memenuhi kebutuhan interaksional di antara para pandit, alih-alih sebagai peranti heuristik pengguna bahasa.

Menyerap memang seharusnya jadi jurus terakhir. Masih ada kiat lain yang cukup menantang, yaitu pemadanan menggunakan bahasa daerah. Kata *unggah* dan *unduh* dari bahasa daerah pada domain teknologi informasi adalah contoh sukses, membayar "trauma leksikal" *sangkil* dan *mangkus* dulu.

Sejatinya, ratusan budaya yang diabstraksi dalam bahasa daerah merupakan lumbung bahan baku padanan istilah asing. Lumbung tersebut, malahan, sudah bermarkah sesuai dengan kekhasan sosial budaya masing-masing (ekoleksikon). Budaya Manggarai yang kaya dengan konsep-konsep wanatani (*agroforestry*), misalnya, memiliki spesifikasi nama yang cermat dan rinci, mulai tentang masa bertunas sampai panen beberapa jenis tanaman produksi.

Bahasa Jawa melimpah dengan istilah kekerabatan. Di samping memiliki konsep khusus untuk beberapa generasi sebelum dan setelah ego secara vertikal, bahasa itu juga punya nama tersendiri untuk kekerabatan secara horizontal. Bahasa dengan penutur paling banyak itu adalah kandidat paling presisi untuk bidang hukum waris.

Demikian juga dengan bahasa Bugis dan Makassar. Duo bahasa itu merupakan salah satu jawara ekoleksikon kemaritiman dan kelautan. Orang Bugis-Makassar, bahkan, telah memberi nama Marege untuk benua yang kemudian dikenal dengan Australia.

Bahasa Dayak memiliki banyak istilah seputar perikanan darat. Salah satunya *sentak* yang biasa digunakan sebagai padanan *strike*. Orang Banjar sering menggunakan istilah *sakang* untuk ponsel atau komputer yang *hang*. Bahasa Moronene di Sulawesi Tengah menggunakan kata *arupako* untuk konsep 'melakukan banyak kegiatan dalam satu waktu' (*multitasking*).

Fleksibilitas

Bahasa daerah ternyata juga memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam mengusung konsep, bahkan yang beranah sastra. Seorang kawan penutur bahasa Dawan, yang dituturkan oleh hanya puluhan ribu sampai sejuta penutur (ethnologue.com), di Nusa Tenggara Timur berhasil menerjemahkan ke-103 puisi Gitanjali-nya Tagore, si peraih Nobel Sastra, ke dalam bahasa Dawan.

Penerjemah tidak menjodohkan kata dengan kata belaka. Dia mendalami kedua bahasa lebih dahulu, terutama bahasa Bengali, bahasa sumber, karena dia penutur bahasa Dawan. Dia mendedikasikan 10 tahun waktunya untuk memetik hasil Gitanjali dalam bahasa Dawan.

Jadi, pemadanan istilah asing dengan bahasa daerah bukan hanya tentang menemukan cangkang konsep yang cocok. Hal itu juga terkait dengan bagaimana mengubah kebiasaan dan sikap kita yang akan mengerek prestise bahasa daerah agar leluasa duduk pada serambi yang sama dengan bahasa Indonesia.

Kompas 5 Desember 2023

JELAJAH BUDAYA

Berbagai Upaya Menyelamatkan Aksara Incung di Jambi

KEKAYAAN naskah-naskah kuno berisi aksara Incung berusia ratusan tahun yang berasal dari masyarakat Kerinci, Jambi, terancam punah karena tidak digunakan dalam aktivitas keseharian.

Untuk menyelamatkan warisan budaya takbenda yang tersisa tersebut, sejumlah pihak mengambil kebijakan pelestarian terhadap identitas peninggalan kuno.

Akademisi dan peneliti studi arkeologi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi sekaligus tim editor Cerita Rakyat dari Badan Bahasa Provinsi Jambi, Hafiful Hadi Sunliensyar, mengatakan aksara Incung merupakan aksara kuno di Kerinci yang digunakan nenek moyang orang Kerinci untuk menulis naskah dan prasasti.

"Saat ini sebagian besar manuskrip masih berada di tangan masyarakat dalam konteks benda pusaka atau benda yang dikeramatkan," ungkapnya saat ditemui *Media Indonesia* di Kawasan Kerinci, Provinsi Jambi.

Pelestarian manuskrip kuno itu perlu mendapatkan perhatian lantaran semakin melapuk karena lama disimpan di atas loteng rumah. Disebutkan naskah yang terbuat dari kulit kayu, kertas, bambu, dan tanduk itu hanya bisa ditemui pada masyarakat adat dan kondisinya mulai mengkhawatirkan karena tak mudah untuk diakses.

"Naskah-naskah aksara Incung saat ini masih dapat ditemukan di masyarakat adat, terdapat rumah khusus untuk menyimpan benda-benda pusaka seperti itu jadi manuskrip aksara Incung ini belum terpublikasi secara luas dan aksesnya sulit didapatkan publik," jelasnya.

Cara lainnya pelestarian aksara Incung ialah melahirkan anak muda yang mampu menulis dan membaca melalui pengembangan komunitas sastra dan bahasa. Upaya pelestarian aksara Incung juga terus dilakukan para peneliti dengan menggagas sistem digitalisasi aksara Incung agar bisa digunakan dalam platform digital dengan harapan ada percakapan dengan aksara daerah dalam platform digital yang menarik untuk anak muda.

Naskah tertua Incung yang ditemukan di dalam naskah Melayu Tua berupa naskah kitab *Undang-Undang Tanjung Tanah*, masih eksis hingga saat ini. Penggunaan aksara Incung tersebut berada pada dua lembar bagian akhir yang ditandai dengan aksara Incung tipe awal pada 814 atau sekitar 600 tahun lalu.

"Namun, aksara Incung mulai tidak digunakan masyarakat Kerinci pada sekitar abad ke-19 akhir karena tergantikan dengan aksara Arab Melayu atau aksara Jawi," jelasnya.

Aksara Incung mulai kembali dipelajari masyarakat Kerinci pada 1970-an melalui catatan penelitian naskah Incung yang dilakukan peneliti Belanda bernama Western Eng. (Dev/H-1)

Mengenal Aksara Incung

- Digunakan suku Kerinci di Provinsi Jambi.
- Kerinci berjarak 430 km dari pusat Kota Jambi.
- Memiliki dua daerah administrasi, yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Fungsi Aksara Incung

- Sejarah
- Hukum adat
- Sastra
- Mantra-mantra

Isi Naskah Kuno Aksara Incung

Tembo

- Historiografi tradisional yang berisi kisah perjalanan dan silsilah nenek moyang suatu kelompok.
- Tembo beraksara Incung ditulis pada media tanduk kerbau dan tanduk kambing.

Karang Mindu

- Prosa berisi ratapan kesedihan si pembuat naskah.
- Karang Mindu beraksara Incung kebanyakan ditulis pada media bambu dan kertas lama.

Penyebaran Naskah-Naskah Bertulisan Incung

Dalam Negeri

- Di rumah penduduk sebagai pusaka yang dikeramatkan.
- Tersimpan di Museum Negeri Jambi.
- Tersimpan di Museum Nasional Jakarta.

Luar Negeri

- Tersimpan di Museum Leiden Belanda.

Tiga Fase Sejarah sebelum Belanda Masuk Kerinci

- Periode Kerajaan Manjuto atau Kerajaan Pamuncak Nan Tigo Kaum
- Periode Depati
- Periode Depati IV Alam Kerinci

Melestarikan Aksara Incung

2014:
- Aksara Incung yang merupakan warisan budaya takbenda yang dimiliki Provinsi Jambi ditetapkan Kemendikbud.
- Aksara Incung ini tergolong hampir punah di masyarakat.
- Aksara Incung ini menjadi pemersatu masyarakat Kerinci melawan penjajah (Belanda).

2018:
- Pemerintah melakukan upaya pelestarian aksara ini seperti pembuatan nama jalan atau kantor pemerintahan menggunakan aksara Incung.
- Pemerintah Kota Sungai Penuh pernah juga mengadakan lomba melukis ragam hias aksara Incung.

2019:
- Kabupaten Kerinci terpilih menjadi salah satu daerah penyelenggaraan program Creative, Training, and Education atau Create.
- Ada juga beberapa anak muda yang membuka kelas belajar ak[illegible] Incung.

Media Indonesia, 4 Desember 2023

YANWARDI
Editor Lepas, Penelaah Bahasa

Kegamangan Kamus

Dalam data pemakaian bahasa, melalui pencarian di Google dan survei terbatas, ditemukan kata *mengeklik* dan *mengklik*, dari bentuk dasar *klik* yang mendapat imbuhan *me-*. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memilih *mengeklik* sebagai bentuk yang baku. Namun, untuk gejala yang sama, KBBI memilih *menskors*, bukan *mengeskors*.

Tulisan ini—melengkapi tulisan Priskilia B Sitompul yang dimuat di Kompas.id (30 September 2023, "Mengklik" atau "Mengeklik")—akan membahas secara khusus gejala kebahasaan yang terjadi dalam pengimbuhan (afiksasi) di antara awalan *me-* dan kata dasar bersuku tunggal yang berawal kluster (konsonan rangkap). Kata dasar jenis ini umumnya berasal dari bahasa asing dan tidak banyak jumlahnya, misalnya *klik, klaim, blok, drop, plot, skor, skors*, dan *smes*.

Dari data kebahasaan di Google dan survei terbatas serta KBBI sebagai pelengkap, ditemukan kata turunan *mengeklik-mengklik; mengeklaim-mengklaim; mengeblok-memblok; mengedrop-mendrop; memplot; menskor; menskors*; dan *mensmes*. Khusus untuk data *mensmes* hanya muncul dalam KBBI.

Tampak ada perbedaan gejala (morfofonemik) untuk kata dasar *klik, klaim, blok*, dan *drop* yang memunculkan dua jenis morfofonemik, yakni *menge-* vs *meng-* , *menge-* vs *mem-*, dan *menge-* vs *men-*. Sebagai catatan, KBBI kini menyatakan bentuk yang baku adalah yang memakai *menge-*: *mengeklik, mengeklaim, mengeblok*, dan *mengedrop*, meskipun data yang lebih banyak muncul dalam pemakaian di masyarakat adalah *mengklik, mengklaim, memblok*, dan *mendrop*.

Pengekalan

Untuk kata dasar lainnya, *plot, skor, skors*, dan *smes*, sistem morfofonemiknya adalah pengekalan atau tidak luluh, seperti dalam afiksasi *me-* + kata dasar bersuku kata lebih dari satu yang berawal kluster (*mengkritik, mempraktikkan, menstabilkan*). Dari data Google dan hasil survei, morfofonemik semua kata dasar bersuku tunggal yang diawali dengan kluster ini selalu mengambil aturan pengekalan.

Bahkan, dalam kasus yang memunculkan dua jenis morfofonemik tersebut, jumlah atau frekuensinya lebih banyak yang jenis pengekalan daripada morfofonemik yang memunculkan *menge-*. Yang terakhir ini terjadi bukan dalam pengimbuhan di antara *me-* + kata dasar, melainkan hasil simulfiksasi dahulu, seperti *sate-nyate* dan *kopi-ngopi*, baru pengimbuhan.

Sebab itu, dengan berangkat dari fakta dan kecenderungan data yang hidup, untuk menyimpulkan sistem morfofonemik afiksasi *me-* + kata dasar bersuku tunggal berawal kluster, saya menganalisis "hanya" data *mengklik; memblok; mendrop; memplot; menskor; menskors;* dan *mensmes*. Dari data itu, tampak bahwa sistem morfofonemiknya adalah pengekalan bunyi (fonem) awal kata dasar atau tidak luluh bunyi awalnya. Sementara itu, bunyi nasal (sengau) yang muncul sesuai (homorgan) dengan fonem atau bunyi awal kata dasarnya.

Simpulan ini lebih komprehensif, tidak parsial, dan mewakili daripada "aturan" yang menyatakan sistem morfofonemik *me-* + kata dasar bersuku tunggal berawal kluster adalah *menge-*. Terbukti, KBBI pun tidak dapat menerapkannya, misalnya pada *skor* dan *skors*. Bahkan, KBBI merekam kedua bentuk tersebut menjadi *menskor* dan *menskors*, yang justru memperkuat "aturan" pengekalan. Jadi, tampak bahwa KBBI tidak konsisten.

Aturan morfofonemik pengekalan sebagaimana dikemukakan pada paragraf sebelumnya akan lebih relevan jika sesuai dengan data. Pada gilirannya, "aturan" ini lebih komprehensif menjangkau gejala morfofonemik pengimbuhan di antara awalan *me-* + kata dasar bersuku tunggal berawal kluster, tidak hanya *klik, klaim, blok*, dan *drop*. Tidak ada pula ketidakajekan seperti yang tampak pada KBBI: *mengeklik* dan *menskors*.

Kompas, 12 Desember 2023

Kapan Kita Pergi dan Berangkat

>JOKO PRIYONO*

SEORANG kawan bertanya: "Kapan kita menggunakan *pergi* dan *berangkat*?" Sekilas, pertanyaan itu terkesan bodoh dan retoris. Namun pertanyaan itu membuat saya benar-benar berpikir tentang makna dua kata tersebut.

Ingatan saya kembali pada pelajaran bahasa Indonesia. Lewat cerita-cerita di teks bacaan, lema *pergi* dan *berangkat* mudah kita temukan. Mulanya saya curiga terhadap pengalaman saya dalam membaca teks tersebut karena dua lema itu sudah lama terkooptasi dan melahirkan situasi bias gender.

Kalimat yang biasanya menggambarkannya adalah pengisahan situasi di dalam rumah ketika pagi hari. Bapak berangkat ke kantor, sementara ibu pergi ke pasar. Pengisahan ini bermasalah dan terus terwariskan ke anak-anak sekolah. Bisa jadi pelajaran bahasa Indonesia sampai abad XXI belum bisa mengurai permasalahan yang telanjur langgeng itu.

Kata *pergi* dan *berangkat* berbeda makna. *Pergi* menggambarkan dimensi jarak, sedangkan *berangkat* menautkan dimensi waktu seketika.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) memuat tiga arti lema *pergi*, yakni (1) berjalan (bergerak) maju, (2) meninggalkan (suatu tempat), dan (3) berangkat. Meskipun telah termaktub dalam makna lema *pergi*, *KBBI* memberikan arti *berangkat* berupa: (1) mulai berjalan (pergi, bepergian) dan (2) mulai menjadi (besar, akil balig); beranjak. Kita mulai ragu terhadap keterangan ini.

Sebagai orang bodoh, saya tergerak mencari pengisahan dua lema tersebut. Saya teringat pada lagu "Kereta Malam" (1973) karya Rhoma Irama yang dipopulerkan oleh penyanyi Elvy Sukaesih. Di lagu itu kita mendapati penggunaan *pergi* dan *berangkat*: "Pernah sekali aku pergi/Dari Jakarta ke Surabaya/Untuk menengok Nenek di sana/Mengendarai kereta malam". Kata *pergi* di sini menggambarkan dimensi jarak. Pergi itu berurusan dengan perjalanan jauh.

Sementara itu, kata *berangkat* terdapat dalam lirik: "Jug, gijak-gijuk, gijak-gijuk/Kereta berangkat/Jug, gijak-gijuk, gijak-gijuk/Hatiku gembira". *Berangkat* menautkan dimensi waktu seketika. Ini yang membuat kita mafhum bahwa di stasiun, bandar udara, hingga terminal bus yang dimunculkan adalah jadwal keberangkatan, bukan jadwal kepergian. Kendati orang-orang naik bus, pesawat, ataupun kereta untuk bepergian lama, moda transportasi kita memilih *berangkat*.

Pergi mengingatkan saya pada lagu "Pergilah Kasih" (1991) ciptaan Chrisye: "Pergilah kasih kejarlah keinginanmu/Selagi masih ada waktu". Makna *pergi* dalam lirik itu menunjukkan jarak yang jauh. Bisa dimaklumi bila banyak orang yang patah hati mengubahnya menjadi "Pergilah kasih kejarlah selingkuhanmu". *Pergi* di sini dimaknai merelakan kekasihnya dan mungkin tiada kesempatan untuk kembali lagi.

Penggambaran yang sama terlihat dalam puisi Saras Dewi, "Amanat", dalam buku kumpulan puisinya, *Kekasih Teluk* (2022). Saras menulis: "Menggunakan sayap dari besi/Aku pergi meninggalkan negara tempatku dilahirkan/Desa tempatku bercanda kanak-kanak/Kota tempatku dibesarkan".

Meski *KBBI* memberikan pengertian *pergi* dan *berangkat* sebagai kata kerja yang bermakna sama, saya berkukuh tak lekas menerimanya. Bagi saya, perkara-perkara di atas perlu dijadikan pertimbangan lanjutan untuk lebih rinci dalam memberi penjelasan dan penggunaannya.

Ada cendekiawan Nahdlatul Ulama, Kiai Saifuddin Zuhri (1919-1986), yang pernah menjabat Menteri Agama. Salah satu warisan pemikirannya tertuang dalam buku *Berangkat dari Pesantren* (1987). Bagi saya, dulu ia memikirkan betul makna *pergi* dan *berangkat* untuk judul bukunya. Bisa dibayangkan jika dulu ia menggunakan lema *pergi*, pastilah judul itu memiliki konotasi buruk. Pergi terkesan meninggalkan dan tidak akan kembali lagi.

*) PENGARANG BUKU *BERSANDAR PADA SAINS* (2022)

Majalah Tempo, 10 Desember 2023

KURNIA JR
Cerpenis, Kolomnis

Mati

Tiga hari sejak pecah perang di Gaza, BBC menulis dua kata berbeda secara mencolok perihal korban tewas dalam dua paragraf berturut-turut, yang memantik kontroversi.

"*More than 500 people have* died *in Gaza after Israel launched massive retaliatory air strikes, according to Gaza's health ministry.*

More than 700 people have been killed *in Israel since Hamas launched its attacks on Saturday*".

Untuk korban di kalangan warga sipil Palestina disebut *died*, meninggal dunia, sedangkan korban di pihak Israel disebut *killed*, terbunuh.

Dalam opini publik, diksi tersebut bersifat politis, partisan, dan berat sebelah. Seakan-akan yang menimpa pihak Palestina adalah kematian wajar, sementara yang menimpa pihak Israel akibat pembunuhan.

Diksi tak sesederhana naivitas, melainkan cerminan sikap moral, tatanan emosi, kecenderungan mental, ideologi, pandangan-dunia.

Kosakata bermakna kematian mengingatkan saya pada suatu kejadian yang perlu kita cermati.

Ada seorang reporter menulis naskah berita yang sepintas lalu menyebutkan fragmen riwayat Nabi Muhammad SAW. Perihal kematiannya, ia tulis bahwa sang Rasul "tewas". Diksi ini bukan hanya "tidak patut" menurut adab, bahkan keliru dalam realitas kesejarahan.

Pertama, *tewas*, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah kematian dalam perang, akibat bencana alam, atau kecelakaan.

Kedua, bahasa Indonesia, sebagai varian bahasa Melayu berstandar adab budaya tinggi, juga mengadopsi nilai-nilai spiritual, moral, dan etika bahasa-bahasa Nusantara yang mengusung budaya luhur. Bahasa kita mengenal makna leksikal *honorary* atau penghormatan dalam konteks tertentu.

Pemaknaan ini memperlakukan subyek khusus dengan diksi khas, di antaranya figur yang disakralkan, raja, panutan, tokoh bijak bestari atau yang disegani khalayak, yakni mereka yang berkedudukan tinggi secara kultural, sosial, religi, dan/atau politik.

Sekalipun, misalnya, tokoh tersebut mati dalam peperangan, ia tak dengan serta-merta dikatakan tewas, tetapi gugur, atau dalam narasi religius bagi figur kerohanian disebut *syahid* (mati syahid), bahkan secara lebih khusus lagi disebut "meraih syahadah".

Akan halnya Nabi Muhammad, bahkan beliau tidak mati dalam perang. Maka, diksi *tewas* tidak bisa digunakan. Apalagi, beliau figur yang sangat disakralkan oleh umat Islam. Yang lazim diterapkan ialah kata *wafat*, *mangkat*, *tutup usia*, atau *mengembuskan napas terakhir*.

Malah ada seorang ulama, sedemikian hati-hatinya memilih kata perihal kematian sang Nabi, menggunakan istilah *hijrah*, yang merujuk ke makna perpindahan roh suci dari alam fana ke alam baka. Tersirat ketakziman yang dimanifestasikan secara intim melalui diksi tersebut.

Ada kosakata penghormatan, ada pula yang bersifat merendahkan. Misalnya, tentang seorang bromocorah sadis yang mati ditembak polisi karena melawan saat ditangkap, di dalam obrolan kerap dikatakan "mampus didor polisi" atau "modar ditembus timah panas". Media level "koran kuning" biasanya menirukan langgam informal semacam itu.

Melalui diksi yang ekspresif kita dapat mengenali nilai-nilai kultural-spiritual yang dihayati masyarakat serta opini umum atas isu dan figur aktual.

Kompas, 26 Desember 2023

Latihan Terjemahan Buku Cerita Anak ke Bahasa Daerah

SEBANYAK 46 penerjemah bahasa daerah mendapat pelatihan menerjemahkan buku cerita anak. Hal itu diperuntukkan meningkatkan ketersediaan buku cerita anak dalam bahasa daerah.

"Lokakarya ini dirancang untuk memberikan pelatihan intensif agar mereka dapat lebih mahir dan terampil dalam menerjemahkan buku cerita yang mengakomodasi kebutuhan literasi anak-anak," ucap Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa E Aminudin Aziz dalam Lokakarya Penerjemahan Bahasa Daerah dalam Rangka Fasilitasi UNESCO melalui siaran pers, kemarin.

Aminudin mengungkapkan salah satu fokus penting lokakarya ialah meningkatkan ketersediaan buku cerita anak dalam bahasa daerah. Melalui kolaborasi dengan 46 penerjemah, mereka diharapkan dapat menghasilkan terjemahan 260 buku ke dalam 28 bahasa daerah berbeda.

"Ini bertujuan memperluas akses anak-anak terhadap literatur yang menggunakan bahasa ibu mereka sehingga mendukung pengembangan literasi anak-anak dalam bahasa daerah," jelas Aminudin.

Lokakarya juga bertujuan mendorong gerakan literasi anak-anak dalam bahasa daerah. Acara itu diharapkan dapat memperkaya pengalaman membaca anak-anak dan memperkuat koneksi mereka dengan budaya dan bahasa asli mereka dengan memberikan dukungan aktif terhadap literasi dalam konteks lokal. (Medcom.id/H-3)

Media Indonesia, 9 Desember 2023

Sarjana sonder Skripsi

>SAMDYSARA SARAGIH*

MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengumumkan bahwa mahasiswa program sarjana tidak lagi wajib membuat skripsi. Anak buahnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi adalah orang tersibuk akibat kebijakan anyar tersebut. Surat edaran dan petunjuk teknis mesti disebar ke semua perguruan tinggi yang bertanya-tanya ihwal cara menerapkannya.

Meskipun dengan bobot lebih kecil, anak buah Menteri Nadiem di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga kecipratan kerja. Mahakarya Badan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (*KBBI*), mau tak mau harus dipermak buntut peniadaan kewajiban skripsi di kampus. *KBBI Edisi V* mendefinisikan *skripsi* sebagai "karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya". Lantaran skripsi sudah tidak lagi wajib, definisi tersebut kehilangan relevansinya.

Kebijakan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang menghapus kewajiban menulis skripsi berdampak pada masalah kebahasaan.

Kata *skripsi* diserap dari *scriptie*, kata bahasa Belanda yang kira-kira berarti esai ilmiah. *Kamus Belanda-Indonesia* (2005) karangan Susi Moeimam dan Hein Steinhauer singkat saja menaruh padanannya: skripsi. Kata tersebut sudah dipersempit maknanya untuk tulisan dunia akademis karena bahasa Belanda juga mempunyai kata *script* untuk teks tertulis secara umum.

Skripsi satu leluhur dengan *scription* atau *script* dalam bahasa Inggris yang bermakna "tulisan secara umum". Menurut *Origins: An Etymological Dictionary of Modern English* (1990) karya Eric Partridge, *scription* berasal dari kata Latin *scriptio*. Sementara itu, *script* diambil dari kata Latin *scriptum*. Salah satu turunan kata ini adalah *scripture*, yang bermakna kitab keagamaan.

Negara-negara yang terpengaruh budaya Inggris mengadopsi kata *thesis* untuk tulisan ilmiah karya mahasiswa. *Oxford Advanced Learner's Dictionary 9th Edition* mengartikan kata itu sebagai *"a long piece of writing completed by a student as part of a university degree, based on their own research"*. Definisi tanpa embel-embel "wajib" memang lebih aman karena di Amerika Serikat, sebagai contoh, tidak semua kampus mewajibkan tesis untuk program sarjana.

Kira-kira definisi skripsi setelah tidak lagi wajib akan menjadi begini: karangan ilmiah yang ditulis mahasiswa program sarjana sebagai bagian dari persyaratan terakhir pendidikan akademisnya. Menurut saya, perlu ada tambahan "program sarjana", mengingat sebutan untuk karya ilmiah terakhir buat mahasiswa magister adalah tesis dan untuk mahasiswa doktoral adalah disertasi.

Jika mau gampang dan mengesankan kolaborasi, para munsyi Badan Bahasa bisa saja membebek koleganya penyusun peraturan menteri tadi. Peraturan itu mengamanatkan tentang ketercapaian kompetensi lulusan melalui "pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok". Dengan demikian, definisi skripsi adalah "salah satu bentuk tugas akhir mahasiswa program sarjana untuk mencapai kompetensi lulusan". Tapi definisi ini bisa saja nanti berubah bila kebijakannya berubah.

Di sisi lain, ada isu kebahasaan yang lebih elementer menyusul peniadaan kewajiban skripsi. Meski dibilang membebani, skripsi adalah wahana untuk mendekatkan mahasiswa kepada bahasa persatuan kita. Pengalaman saya, mahasiswa nonsastra rata-rata tidak serius ketika mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia. Tapi memori mahasiswa tentang materi dan dosen bahasa Indonesianya akan mencuat ketika menyusun skripsi.

Dosen pembimbing skripsi yang baik akan selalu mengingatkan mahasiswanya untuk merujuk *KBBI* dan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Kesalahan redaksional di naskah skripsi bisa jadi bahan untuk mengkritik sang penulis. Bila skripsi tidak lagi diwajibkan, makin minimal saja persentuhan mahasiswa dengan bahasa Indonesia dan praktik tulis-menulis. T | PRAKTISI PENULISAN

Majalah Tempo, 24 Desember 2023

PENILAIAN PELAJAR

Hasil PISA 2022, Krisis Belajar yang Tak Berujung

Krisis mutu belajar di Indonesia sudah lama digaungkan, salah satunya mengacu pada hasil Programme for International Student Assessment (Program Penilaian Pelajar Internasional/PISA) yang diikuti Indonesia sejak tahun 2000. Pada 2021, Bank Dunia menyebut lama bersekolah siswa Indonesia rata-rata 12,4 tahun setara dengan 7,8 tahun pembelajaran.

Pandemi Covid-19 yang memicu penutupan sekolah membuat ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) seperti dialami banyak negara lain. Itu terbukti dalam hasil PISA 2022 yang dirilis Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada Selasa (5/12/2023).

Rata-rata skor di 35 negara OECD turun hampir 15 poin untuk matematika, 10 poin skor membaca, tapi tak berubah signifikan untuk sains.

Bagi Indonesia, hasil PISA 2022 jadi capaian terburuk atau membuat hasil pendidikan kembali seperti di awal Indonesia ikut penilaian hasil belajar bidang matematika, membaca, dan sains bagi pelajar usia 15 tahun. Skor Indonesia jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Jadi, meski tuntas pendidikan dasar, secara umum pelajar Indonesia belum punya kecakapan dasar memadai menghadapi perubahan dunia yang kompleks. Kecakapan berpikir tingkat tinggi jauh dari gapaian anak-anak Indonesia dibandingkan anak-anak dari negara maju atau OECD.

Namun, narasi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengedepankan peningkatan posisi Indonesia 5-6 poin serta penurunan di bawah rata-rata internasional.

Nadiem yakin dari data Asesmen Nasional tiga tahun terakhir, ada indikasi pemulihan *learning loss*. Salah satunya karena pada masa pandemi Kemendikbudristek menetapkan kurikulum darurat fokus pada literasi dan numerasi, dilanjutkan Kurikulum Merdeka yang memberi fleksibilitas pembelajaran dan sekolah fokus pada kecakapan literasi, numerasi, dan karakter.

Hasil PISA yang memburuk menunjukkan darurat pendidikan.

Ahmad Rizali

Jika pencapaian PISA sebagai gambaran mutu sistem pendidikan negara, untuk skala Asia Tenggara, pencapaian Indonesia tak menggembirakan. Singapura yang ada di urutan pertama punya sistem pendidikan bermutu tinggi di dunia.

Indonesia lebih baik daripada Filipina dan Kamboja yang menurut PISA 2022 di urutan buncit dari 81 negara. Namun, dibandingkan Vietnam, Indonesia jauh tertinggal. Demikian pula dari Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.

Belum mendukung

Sistem pendidikan nasional belum mendukung terciptanya sumber daya manusia (SDM) unggul untuk meraih visi Indonesia 2045 jadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi untuk jadi negara maju bisa tercapai dengan ditopang SDM unggul.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan, keikutsertaan Indonesia dalam PISA menunjukkan komitmen Kemendikbudristek memakai data mutu pembelajaran dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. "Dengan ikut PISA, kita memantau kondisi pendidikan kita secara longitudinal sejak 2000," ujarnya.

Lebih dari dua dekade, Indonesia meningkatkan angka partisipasi sekolah. Tahun 2022, untuk usia 7-12 tahun hampir 100 persen, usia 13-15 tahun hampir 96 persen, dan usia 16-18 tahun lebih dari 73 persen. Harapan lama sekolah pun meningkat. Pada 2022, rata-rata anak usia 7 tahun diproyeksikan bersekolah 13 tahun, setara diploma satu.

"Untuk akses, kita melesat. Namun, mutu belum jadi fokus sehingga krisis belajar yang tergambar di PISA berlangsung. Dengan Merdeka Belajar, fokus pada mutu dilakukan dengan transformasi sistem pendidikan holistik," ujarnya.

Jika dikaitkan dengan kebijakan kurikulum, sampel PISA 2022 diambil sebelum Kurikulum Merdeka diterapkan secara luas. Pada 2021 Kurikulum Merdeka baru diterapkan terbatas di 3.000-an sekolah. Pada Agustus 2022 banyak sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka secara sukarela.

Survei PISA dilakukan pada Mei-Juni 2022, sebelum penerapan Kurikulum Merdeka secara luas. "Jadi, sampel PISA 2022 tak mencakup sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka sehingga hasilnya tak bisa mengukur dampak Kurikulum Merdeka," ucapnya.

Komitmen pada guru

Alexius Chia, Wakil Dekan, Praktikum, dan Kemitraan National Institute of Education Singapura, beberapa waktu lalu menuturkan, kemajuan pendidikan Singapura dengan pendekatan berbagai segi. Selain penyempurnaan kurikulum, komitmen pada guru serius dari pengembangan profesionalisme dan kerangka kerja mendukung pendidik. "Kualitas guru jadi gambaran mutu sistem pendidikan," ucapnya.

Untuk mengatasi krisis belajar di pendidikan dasar, sejumlah praktisi dan pemerhati pendidikan mencanangkan Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika (Gernas Tastaka). Hal ini diikuti Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Membaca (Gernas Tastaba).

"Hasil PISA yang memburuk menunjukkan darurat pendidikan. Ini berpengaruh pada indeks modal manusia Indonesia yang mengukur produktivitas manusia Indonesia. Presiden mesti serius menginstruksikan perbaikan mutu pendidikan," kata Wakil Ketua Perkumpulan Nusantara Utama Cita, Ahmad Rizali.

Anindito menekankan, jangan sampai rendahnya mutu pendidikan ditimpakan pada guru. Sebab, kehadiran guru memberi pembelajaran bermakna terkait dukungan ekosistem pendidikan pada mutu pembelajaran.

(ESTER LINCE NAPITUPULU)

antam

PENGUMUMAN TENDER UMUM

PT ANTAM Tbk mengundang penyedia barang / jasa untuk mengikuti tender umum sebagai berikut :

Tender Umum	: Pengadaan Jasa Development (Infrastructur) dan Mine Block Test (MBT) IUP Mempawah
Nomor	: 85/TENDER UMUM/MSC/2023
Unit Bisnis	: Kantor Pusat
Waktu Pendaftaran	: 11-12-2023 s.d 15-12-2023
Kontak	: teguh.firmansyah@antam.com; cc adi.saputra@antam.com atau (62-21) 789 1234, Ext. 1120 atau Fax. 021-78844941

Syarat Pendaftaran dengan melampirkan copy/ salinan :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai bidang dan masih berlaku;
2. Laporan Keuangan minimal tahun 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan Opini Wajar;

Jakarta, 11 Desember 2023
Supply Chain Management Division Head

mudah membandingkan kondisi pendidikan di negaranya dengan negara lain yang berhasil berubah menjadi lebih berkeadilan.

Di sisi lain, perbandingan antarnegara secara tidak sengaja menyempitkan definisi kualitas pendidikan pada kemampuan kognitif (dalam hal PISA: literasi membaca, matematika, dan sains). Ini terjadi karena kemampuan kognitif lebih mudah diukur dan diperbandingkan secara (lebih) obyektif, dibanding hasil belajar seperti keterampilan sosial-emosional, etis, dan spiritual. Fokus sempit pada kemampuan kognitif ini dapat mereduksi makna pendidikan sebagai pelayan kepentingan ekonomi.

Pelajaran dari PISA

Banyak orang yang mencermati hasil PISA untuk mencari *panacea* atau obat yang bisa mengatasi segala permasalahan pendidikan. Ini tecermin, misalnya, dari minat yang cenderung obsesif untuk menemukan kebijakan yang menjadi "resep rahasia" sistem pendidikan Finlandia.

Tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari sistem pendidikan Finlandia. Misalnya, seleksi dan pendidikan guru sangat menentukan kualitas pembelajaran. Namun, itu baru satu faktor, dan cara meningkatkan kompetensi guru pun akan tergantung pada konteks. Solusi Finlandia tidak bisa diimpor dan diterapkan begitu saja di Indonesia atau negara lain.

Selain hasilnya, yang juga berharga dari PISA adalah proses perumusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasilnya. PISA bisa menjadi model penyusunan asesmen yang berkualitas untuk memberi arah yang jelas pada upaya transformasi sistem pendidikan. Hasil asesmen juga esensial untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan dari upaya transformasi.

Perumusan dan pengukuran arah transformasi ini tampak seperti isu teknis yang remeh. Padahal, kejelasan arah dan tujuan adalah hal kunci dalam upaya perubahan. Upaya transformasi sistem pendidikan sering dicoba di berbagai negara, tetapi jarang membawa hasil yang diharapkan.

Menurut Michael Fullan, ahli transformasi sistem pendidikan dari Universitas Toronto, reformasi pendidikan sering gagal karena dilakukan secara terfragmentasi. Akibatnya, komponen-komponen kebijakan tidak saling selaras dan dialami oleh para pendidik sebagai tumpukan perubahan yang tidak jelas atau bahkan saling bertentangan tujuannya.

Sebagai contoh, banyak negara, termasuk Indonesia sejak 2004, yang mengubah tujuan pembelajaran dalam kurikulumnya agar lebih berorientasi pada kompetensi alias kedalaman pemahaman dan kemampuan aplikasi. Namun, isi kurikulumnya terus ditambah dan ujian yang diterapkan masih mengukur keluasan pengetahuan, bukan kedalaman pemahaman. Kontradiksi internal seperti inilah yang membuat banyak upaya transformasi pendidikan gagal.

Agar padu dan tidak terfragmentasi, kebijakan-kebijakan baru dalam upaya transformasi harus dirancang untuk mencapai tujuan yang sama. Di sini peran penting asesmen berskala besar: untuk mendefinisikan arah perubahan secara jelas dan mengukur pencapaiannya secara berkala.

Dalam hal ini, PISA menawarkan pelajaran tentang cara mengukur kompetensi tanpa terikat pada materi kurikulum tertentu. Dengan kata lain, model asesmen PISA memberi arah transformasi dan metrik yang jelas untuk memantau kemajuan, tanpa menuntut penyeragaman dalam hal konten dan proses pembelajaran.

Dengan demikian, materi pembelajaran bisa dikembangkan oleh sekolah, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Topik bacaan di sekolah di perdesaan dan perkotaan boleh berbeda. Yang penting pengalaman membaca tersebut menumbuhkan minat baca dan mengasah keterampilan untuk menganalisis informasi yang dibaca.

Dari PISA, kita juga bisa belajar tentang pemanfaatan hasil asesmen sebagai pijakan empiris untuk merumuskan kebijakan dan umpan balik untuk mengevaluasinya. Asesmen saja tidak akan pernah bisa meningkatkan kualitas. Indonesia punya pengalaman pahit dengan hal ini, ketika pemerintah meningkatkan secara bertahap batas nilai kelulusan di Ujian Nasional.

Hal itu diasumsikan bakal mendorong perbaikan kualitas pembelajaran. Ini terbukti keliru. Seperti pepatah tua yang kerap dikutip para pengkritik ujian, seekor sapi tidak akan menjadi gemuk karena sering ditimbang. Sebaliknya, sapinya justru semakin kurus kalau proses menimbangnya terlalu sering dan membuat stres.

PISA diikuti oleh 80 negara, tetapi tidak semuanya secara serius menggunakan hasilnya untuk mengevaluasi dan mengubah kebijakan. Jerman menjadi salah satu di antara sedikit contohnya. Hasil PISA 2000 menunjukkan bahwa sistem pendidikan Jerman tidak hanya medioker, tetapi juga sangat timpang. Hasil ini memberi efek kejut yang mendorong reformasi sistemik, yang pada gilirannya berbuah pada peningkatan skor sekaligus mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

Dari negara yang berhasil melakukan transformasi, kita perlu belajar bahwa data hasil asesmen harus ditelaah dan dipertimbangkan secara serius implikasinya. Ini berarti pemerintah perlu terus membangun kapasitas untuk menganalisis dan menggali *insight* dari hasil asesmen. Selain itu, kapasitas untuk menghasilkan laporan dan menyampaikannya kepada pengambil kebijakan. Idealnya, peningkatan kapasitas ini terjadi di semua tingkat mulai sekolah, pemda, sampai pemerintah pusat.

Menanti pemulihan pembelajaran

Pelajaran dari PISA tentang perumusan arah perubahan serta pemanfaatan hasil asesmen sudah mulai diterapkan dalam Merdeka Belajar. Di Indonesia kita sudah memiliki Asesmen Nasional (AN) yang hasilnya diberikan sebagai umpan balik kepada guru, sekolah, dan pemda melalui platform Rapor Pendidikan. Literasi, numerasi, dan karakter murid menjadi rumusan tujuan transformasi pendidikan. Indikator-indikator kualitas lingkungan belajar menjadi petunjuk tentang cara mencapai tujuan tersebut.

Saat ini hasil AN memberi indikasi awal adanya pemulihan pembelajaran. Seperti dapat dilihat di Rapor Pendidikan Indonesia, kemampuan literasi dan numerasi murid kelas 5 SD dan kelas 8 SMP naik dari 2021 ke 2022. Kenaikan ini mungkin terjadi karena *low base* alias skor literasi dan numerasi yang amat rendah pada 2021. Kita masih perlu melihat apakah tren positif ini bisa terjaga di 2023 dan seterusnya. Di sisi lain, ada tren memprihatinkan terkait turunnya iklim keamanan sekolah - yang mencerminkan meluasnya potensi kekerasan di sekolah.

Dalam konteks inilah implementasi Kurikulum Merdeka menjadi penting. Jika AN menunjukkan tujuan perubahan, Kurikulum Merdeka adalah peta yang memberitahukan jalan menuju tujuan itu. Sebagaimana AN, Kurikulum Merdeka juga berfokus mengasah literasi dan numerasi serta karakter secara lebih holistik, dengan cara mengurangi materi wajib serta memberi kewenangan besar pada sekolah untuk menentukan struktur kurikulumnya.

Satu pelajaran terakhir dari PISA adalah perlunya kesabaran untuk melihat buah dari transformasi pendidikan. PISA dilaksanakan setiap 3 tahun, dan ke depannya akan menjadi per 4 tahun. Ini mencerminkan keyakinan bahwa perubahan apapun baru akan terlihat dampaknya setidaknya setelah 3 sampai 4 tahun.

Untuk kasus Indonesia, Kurikulum Merdeka baru diterapkan secara masif pada Agustus 2022. Kalau kita hendak menggunakan PISA sebagai ukuran keberhasilan, dampak Kurikulum Merdeka paling cepat baru terlihat di PISA 2025. Perlu komitmen bersama untuk memperlakukan kebijakan pendidikan bukan sebagai komoditas politik yang bisa dibongkar pasang tanpa melihat data secara komprehensif.

LITERASI ANAK

Membaca Buku Mendukung Kesehatan Mental

JAKARTA, KOMPAS — Membaca buku saat anak-anak tidak sekadar meningkatkan kognisi yang meliputi proses menyerap pengetahuan, memahami, dan menganalisis. Hal ini juga membentuk pengalaman menyenangkan bagi anak yang mendukung kesehatan mental saat mereka remaja dan dewasa.

Anggota Unit Kerja Koordinasi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Hesti Lestari, mengatakan, menumbuhkan minat baca pada anak perlu dilakukan sejak dini. Anak mulai belajar bahasa lisan ketika mendengar orang-orang di dekatnya berbicara, tertawa, dan bernyanyi.

Anak kemudian memahami bahasa tertulis saat mendengar orang dewasa membaca buku, koran, dan majalah. Pengalaman itu membangun memori menyenangkan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

"Kebiasaan membaca saat anak-anak menjadi salah satu hal yang memengaruhi kesehatan mental di masa depan," ujar Hesti dalam diskusi daring "Mendorong Minat Baca Anak", Kamis (7/12/2023).

Hesti menuturkan, orangtua sebaiknya meluangkan waktu membacakan buku kepada anak. Setelah itu, membiasakan membaca bersama anak. Sebab, anak cenderung meniru kebiasaan orang-orang di dekatnya.

Aktivitas ini juga memperkuat ikatan emosional antara orangtua dan anak. Jadi, upaya menumbuhkan minat baca sejalan dengan membangun interaksi berkualitas dengan anak.

"Saat mendongeng, misalnya, anak merasakan itu sebagai pengalaman menyenangkan. Apalagi, kalau ceritanya memuat pesan-pesan moral, akan lebih baik lagi," ujarnya.

Hesti menuturkan, membacakan buku pada anak sejak dini dapat meningkatkan skor kecerdasan atau IQ sebanyak enam poin. Sementara anak yang tidak diajak membaca cenderung mengalami keterlambatan pembelajaran di kelas.

Selain itu, kebiasaan membaca meningkatkan pengetahuan, empati, dan daya konsentrasi anak. Menurut dia, kemampuan membaca juga berkaitan dengan tingkat pendidikan suatu negara.

"Membacakan buku sejak dini bisa meningkatkan *skill* literatur dasar, perkembangan bahasa, dan keberhasilan akademis," ucapnya.

Upaya menumbuhkan minat baca memiliki sejumlah tahapan berdasarkan rentang usia anak. Anak usia 0-18 bulan, misalnya, diajak untuk meniru ucapan dan mencoba membalik halaman buku. Setelah itu, pada usia 18 bulan sampai 3 tahun, anak mengulang kalimat dari buku favorit atau yang disukai.

Saat anak berusia 3-5 tahun, orangtua mulai membacakan buku untuk anak. Kemudian mengajak anak untuk mencoba menulis huruf.

Hesti menambahkan, keluarga merupakan panutan bagi anak dalam menanamkan kebiasaan membaca. Apalagi, anak usia 4-5 tahun menghabiskan 89 persen waktunya di rumah.

Dua kutub

Ketua Umum IDAI Piprim Basarah Yanuarso mengatakan, terdapat dua "kutub" orangtua di Indonesia dalam menumbuhkan minat baca. Pertama, tidak membudayakan membaca pada anak dan cenderung mendekatkan anak dengan gawai.

Kutub kedua, orangtua yang mengajarkan membaca pada anak terlalu dini. Padahal, sebaiknya dimulai dengan membacakan buku untuk anak sebelum mengajak anak membaca bersama.

"Oleh karena itu, kita perlu yang pertengahan, bagaimana menumbuhkan minat baca dengan tahapan yang tepat sehingga kemampuan literasinya meningkat," ucapnya. (TAM)

Kompas, 8 Desember 2023

Mengambil Pelajaran dari PISA

Anindito Aditomo

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (BSKAP Kemendikbudristek)

Hasil PISA 2022 baru saja diumumkan. Dibanding PISA 2018 posisi Indonesia naik beberapa peringkat, baik untuk literasi membaca, matematika, maupun sains. Pelajaran apa yang perlu dipetik dari hasil PISA terbaru ini?

Perlu diketahui bahwa sampel PISA adalah murid berusia 15 tahun dari sekitar 400 sekolah/madrasah yang dipilih secara acak untuk mewakili populasi sekolah/madrasah di Indonesia. Sebagian besar murid yang terpilih berada di kelas 9 dan 10.

Pengambilan data dilakukan pada Mei–Juni 2022, hanya sebulan setelah pembelajaran terdisrupsi selama 2 tahun oleh pandemi Covid. Ketika menjalani tes PISA, para murid kelas 9 hanya sempat mengalami pembelajaran "normal" pada tahun pertama SMP, sedangkan yang kelas 10 sama sekali belum sempat mengalami pembelajaran "normal" di SMA-nya. Disrupsi ini berperan besar dalam menghasilkan *learning loss* yang tecermin pada penurunan skor PISA 2022.

Di sisi lain, kenaikan peringkat Indonesia menunjukkan bahwa *learning loss* kita relatif tidak separah kebanyakan negara lain. Laporan Bank Dunia tentang dampak pandemi pada pendidikan memproyeksikan skor literasi membaca PISA Indonesia akan turun 25 sampai 35 poin (Afkar dan Yarrow, 2021).

Kenyataannya, skor literasi membaca Indonesia hanya turun 12 poin, lebih rendah dibanding penurunan internasional. Ini mencerminkan resiliensi para pendidik dan murid kita ketika pandemi, serta efektivitas mitigasi yang dilakukan melalui kebijakan seperti penyesuaian kurikulum, penyediaan materi ajar untuk digunakan di rumah, dan bantuan kuota internet dari pemerintah.

Bagaimanapun, hasil PISA 2022 menegaskan pentingnya upaya sistemik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sejalan dengan hal itu, pemerintah melalui Bappenas telah mengusulkan skor PISA sebagai indikator kualitas pendidikan dalam RPJP yang sedang dibahas bersama DPR. Targetnya, murid Indonesia menyamai skor rata-rata OECD pada 2045.

Potensi dan keterbatasan PISA

Asesmen pembelajaran berskala internasional seperti PISA menyajikan informasi yang bisa diperbandingkan antarnegara. Instrumen asesmen internasional seperti PISA dikembangkan oleh kelompok pakar yang bekerja bertahun-tahun menggunakan metodologi yang ketat. Hasilnya adalah data yang memiliki kredibilitas tinggi.

Hal ini memungkinkan pengambil kebijakan untuk belajar dari negara lain. Betul bahwa kebijakan pendidikan sebuah negara tidak bisa begitu saja diboyong dan diterapkan di negara lain. Namun asesmen internasional menunjukkan adanya kebijakan-kebijakan yang efektif dan kurang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam bahasa Andreas Schleicher, arsitek utama PISA di OECD, asesmen internasional menunjukkan "*what is possible*". Hal ini menyulitkan pengambil kebijakan untuk bersembunyi di balik alasan bahwa perbaikan pendidikan terlalu sulit untuk diwujudkan.

Sebagai contoh, hasil asesmen internasional seperti PISA menunjukkan bahwa kebijakan sebuah negara berpengaruh pada keadilan (*equity*) sistem pendidikan. Secara umum semakin tinggi status sosial-ekonomi seorang murid, semakin mungkin ia menerima pendidikan yang lebih bermutu dan semakin baik pula hasil belajarnya. Keterkaitan antara status sosial-ekonomi dan mutu pendidikan ini merupakan cermin dari ketidakadilan.

Namun, hasil PISA menunjukkan bahwa ada negara yang bisa membangun sistem pendidikan yang berkualitas sekaligus berkeadilan, dan status sosial ekonomi murid tidak terlalu erat kaitannya dengan mutu pendidikan yang diterima (misalnya Eslandia, Estonia, Makao, dan Hong Kong).

Melihat hasil ini, pengambil kebijakan tidak bisa beralasan bahwa pengaruh sosial-ekonomi terhadap mutu pendidikan adalah sesuatu yang "*given*". Publik bisa dengan

Kompas, 6 Desember 2023

PISA dan Transformasi Paradigma Asesmen Berbasis Literasi

PENGANTAR:
MULAI 20 Maret 2021, tulisan di halaman Opini yang terbit setiap Sabtu merupakan sinergi antara *Media Indonesia* dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Lintas Negara. PCINU Lintas Negara ialah forum silaturahim, berbagi informasi, dan gagasan antar-PCINU di bawah koordinasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di lebih dari 30 negara di dunia. PCINU menyatukan diaspora santri dengan berbagai latar belakang, seperti kiai, akademisi, praktisi, wirausaha, diplomat, pekerja profesional, dan pejabat pemerintah. Sinergi ini sekaligus wujud peran media mendukung PCINU menyebarkan misi diplomasi Islam *wasatiah* atau Islam moderat untuk perdamaian dunia.

DOK PRIBADI

Iksan K Sahri
Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan Ketua Bidang Kajian Strategis Indonesian Council of Youth Development (ICYD)

DALAM beberapa dasawarsa terakhir di Indonesia, orang belajar pengetahuan sebagai produk serangkainya tanpa ia tahu untuk apa belajar pengetahuan itu. Dengan kata lain, pengetahuan yang diajarkan cenderung tercerabut dari dunia sehari-hari yang ia alami. Akibatnya, pengetahuan yang ia pelajari menjadi pengetahuan ringkih yang cenderung tak berguna dan hanya membuang-buang waktu.

Kini, di abad ke-21, orang mulai sadar bahwa cara belajar kita harus diubah dari sekadar menerima onggokan pengetahuan yang mungkin sudah tak lagi sesuai, dan tak tahu untuk apa pengetahuan itu ada dalam dunia nyata, menjadi belajar sebagai cara berpikir, belajar sebagai sebuah cara pandang. Belajar untuk memperoleh kemampuan analisis dan mengontekskan pengetahuan yang kita pelajari dengan dunia nyata sebagai sebuah keniscayaan.

Pendidikan hari ini memiliki tantangan di mana semua hal bisa terjadi (*age of fluidity*) dengan ditandai *intenet of things* (IoT), *mechine learning*, dan *big data*. Tiga istilah yang saat ini dapat kita lihat sehari-hari dalam keseharian kita.

Para pelajar hari ini lahir sebagai penduduk asli dunia digital (*digital native*), yang terbiasa belajar dengan alat teknologi dan menerima serta memproses informasi yang datang dengan cepat secara bersamaan. Kebutuhan atas kemampuan abad ke-21 berupa berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif adalah sebuah keniscayaan.

Programme for International Student Assessment atau yang dikenal dengan PISA, yang diinisiasi oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), hadir untuk mengukur hal tersebut, terutama dalam beberapa bidang literasi. Literasi sendiri diartikan kemampuan untuk membaca dan menulis serta kompetensi dalam bidang tertentu (*Oxford Dictionary*, 2018).

PISA tidak ingin mengukur apa yang telah dihafal anak-anak, tapi mengukur kemampuan anak-anak dalam bidang-bidang tertentu untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi serta mengaplikasikan ide dan pemahaman pada situasi keseharian yang beragam. Sebanyak 70 negara lebih mengikuti tes PISA ini, termasuk Indonesia.

Metode yang dilakukan ialah setiap tiga tahun para siswa yang berusia 15 tahun dari berbagai sekolah dipilih secara acak. Mereka diminta mengisi tes dalam pelajaran utama, yaitu membaca, matematika, dan sains. Tes PISA bersifat diagnostik yang digunakan untuk memberikan informasi berguna demi perbaikan sistem pendidikan.

Dari ukuran-ukuran itu, hasilnya sejak tahun 2000 di saat PISA pertama kali diadakan, Indonesia selalu berada di urutan bawah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Kondisi itu tidak beranjak setelah 23 tahun masa pengukuran. Sampai 10 tahun yang lalu, bagi para pengambil kebijakan di Indonesia, PISA bukanlah sesuatu yang dianggap penting dalam desain pengetahuan yang harus dimiliki oleh siswa. Kementerian Pendidikan saat itu lebih suka bekerja menurut cara pandangnya dan cenderung tidak menganggap (*ignore*) survei-survei pendidikan multibangsa yang melibatkan banyak negara di dunia.

Pada skor PISA 2022, walaupun secara *ranking* menunjukkan peningkatan 5 atau 6 peringkat, sebenarnya secara skor kita lebih rendah daripada skor yang didapat pada PISA 2018. Penurunan skor ini tentu tidak hanya dialami Indonesia, tapi juga secara umum di seluruh dunia. Dari hasil tersebut, kita bisa berkata bahwa sebenarnya belum ada perubahan berarti pada tingkat literasi para siswa di Indonesia. Skor ini sebenarnya melengkapi tren penurunan sejak survei PISA pada 2012, 2015, dan 2018.

Pasca-2018, sebenarnya PISA akan diadakan pada 2021. Akan tetapi, karena dunia saat itu masih diselimuti oleh pandemi covid-19, maka *scoring* PISA baru dapat dilakukan pada 2022. Dari hasil tiga tes terakhir tersebut, kesimpulan untuk Indonesia masih sama bahwa kemampuan literasi anak-anak Indonesia masih berada di bawah rata-rata literasi partisipan PISA.

Kemendikbud di bawah Nadim Makarim pun sebenarnya tidak tinggal diam. Proses evaluasi belajar tingkat akhir pada setiap jenjang, yang selama ini dipegang oleh pusat (Jakarta), sekarang sudah tidak ada lagi. Evaluasi pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah-sekolah, dan pemerintah hanya melakukan survei untuk melihat kualitas pengelolaan pendidikan di Indonesia.

Dengan merujuk pada hasil PISA, pemerintah kemudian melakukan kinerja pendidikan yang didasarkan pada PISA. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) untuk sekolah di bawah Kemendikbud dan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) untuk madrasah di bawah Kemenag. Keduanya didasarkan pada cara berpikir asesmen yang dilakukan dalam PISA.

Nadim Makarim sendiri menjadi menteri pendidikan sejak 2021, yang kemudian disambut oleh pandemi covid-19 dan memaksa lembaga pendidikan melakukan *shut down* untuk beberapa saat dan melakukan pembelajaran daring saat pandemi yang ternyata berkepanjangan.

Survei PISA 2022 yang diambil pada Mei-Juni 2022, sesaat setelah pandemi berakhir di Indonesia, memang tidak bisa menggambarkan efektivitas kebijakan era Nadim, tidak bisa diambil kesimpulan bahwa yang dilakukan pemerintah gagal karena skor yang didapat lebih rendah ketimbang sebelumnya. Urusan pandemi adalah urusan *force majeure* yang semua orang tidak bisa menghindarinya.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, jika berjalan normal dan tidak ada penyebab mayor seperti pandemi, perang, dan bencana alam, seharusnya buahnya akan bisa dilihat pada jangka tiga tahun lagi tatkala PISA diadakan; apakah ada tren naik ataukah masih tak beranjak di urutan bawah.

> Jika untuk proses pembelajarannya, berarti bisa jadi asesmen tidak perlu dilakukan setiap tahun. Akan tetapi, jika asesmen tersebut untuk mengukur kemajuan kemampuan peserta didik, potret atas peserta didik tersebut harus secara simultan dan konsisten dilakukan dan berjenjang.

Kemampuan literasi sebagaimana disampaikan oleh UNESCO pada akhirnya akan berakibat pada kemampuan ekonomi, kemampuan bersosialiasi, kemampuan kesehatan, kemampuan mengembangkan diri, dan kemampuan mengenali diri. Literasi akan membawa individu dan komunitas ke dalam sebuah kehidupan yang lebih baik karena ia bisa berpikir lebih jernih, melakukan pemetaan masalah, dan mengetahui cara pemecahan masalahnya pada konteks yang lokal dalam narasi yang lebih besar.

Menyiapkan asesmen berbasis literasi

Salah satu persoalan asesmen pendidikan kita selama ini ialah pada evaluasi pendidikan yang tidak berorientasi pada kemampuan literasi anak didik. Berbagai bentuk tes di sekolah sering kali dimaknai

mengukur produk pengetahuan apa yang telah mereka pelajari. Soal sering kali mengilustrasikan bahwa murid adalah gawai penyimpan berbagai informasi yang diberikan, dan saat diperlukan informasi itu akan ditanya.

Padahal, kemampuan literasi adalah melampaui hal tersebut. Lebih jelasnya, membaca atau menulis kata-kata dan angka saja tidaklah cukup untuk menilai kemampuan literasi seseorang. Ia perlu memahami dan dapat menggunakan kata-kata serta angka tersebut untuk tujuan praktis seperti merumuskan ide dan menyelesaikan masalah.

Lebih lanjut, karena literasi setidaknya terbagi dalam dua hal: yaitu literasi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari atau disebut literasi fungsional dan literasi *transferable* berupa kemampuan untuk memperkirakan apa yang penting di masa yang akan datang, maka kedua aspek literasi tersebut harus menjadi panduan bagi pengambil kebijakan dalam menyusun sebuah asesmen.

Untuk menuju itu semua, yang bisa dilakukan oleh kita ialah mendesain sebuah asesmen berbasis literasi berupa asesmen autentik dan asesmen tingkat lanjut (*assessment of higher order thinking*/HOT). Asesmen autentik mengukur pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah keseharian (*real world*).

Penilaian akan dianggap autentik jika melibatkan penerapan pengetahuan dalam situasi di luar ruang kelas oleh guru. Kata kunci untuk asesmen autentik ini ialah penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam keseharian, baik dari contohnya yang nyata maupun artifisial.

Adapun yang kedua, yakni asesmen tingkat lanjut (HOT), adalah sebuah asesmen yang mengukur kemampuan siswa dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menganalisis, menyintesis, dan membenarkan. Hal itu dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam memahami fakta, menarik kesimpulan dari fakta, menghubungkan fakta dengan konsep atau fakta lainnya seperti menggabungkan fakta untuk menciptakan hal-hal baru, dan menggunakan fakta untuk memecahkan masalah. Asesmen tingkat lanjut seharusnya mengukur lebih dari sekadar menghafal fakta dengan melibatkan transformasi informasi dan ide secara kritis, kreatif, dan transformatif.

Pada akhirnya, asesmen berbasis literasi setidaknya harus melibatkan tiga hal penting berupa konten. Ketiganya ialah pengetahuan konten apa yang akan dinilai, aspek kognitif berupa proses berpikir apa yang akan diukur, dan aspek konteks yakni dalam konteks atau situasi seperti apa konten dan pengetahuan kognisi akan diterapkan. Dengan begitu, kemampuan literasi seseorang dapat diukur.

Kabar baiknya, pengambil kebijakan pendidikan di Indonesia hari ini sepakat dengan hal ini dan mencoba menformulasikan bagaimana seharusnya sebuah asesmen dilakukan pada pendidikan di Indonesia.

Hanya, yang perlu ditegaskan sejak awal, pengambil kebijakan harus menentukan apakah asesmen tersebut untuk lembaga pendidikannya ataukah bagi peserta didiknya. Jika untuk proses pembelajarannya, berarti bisa jadi asesmen tidak perlu dilakukan setiap tahun. Akan tetapi, jika asesmen tersebut untuk mengukur kemajuan kemampuan peserta didik, potret atas peserta didik tersebut harus secara simultan dan konsisten dilakukan dan berjenjang.

Media Indonesia, 9 Desember 2023

Porsi yang Tepat Membaca Melalui Buku dan Buku Digital

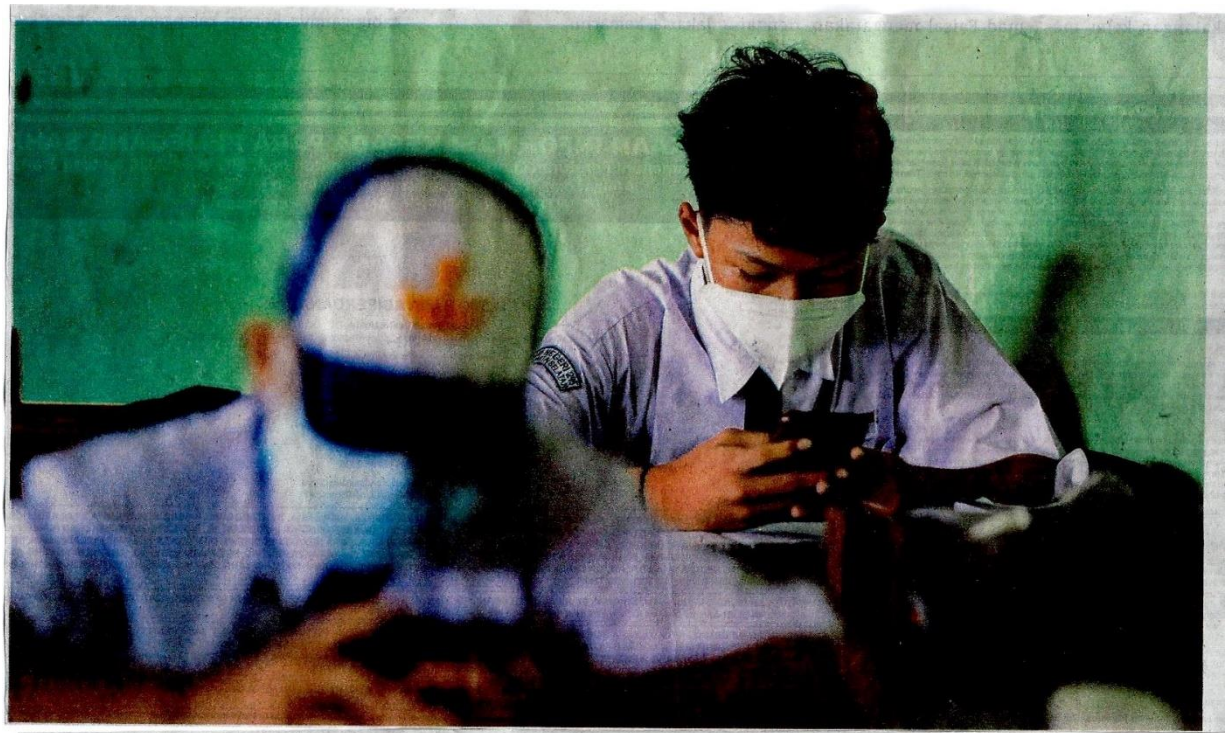

MI/RAMDANI

BUKU SEKOLAH ELEKTRONIK: Siswa kelas 7 menggunakan buku pelajaran sekolah elektronik dari telepon selular saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMP 245, Petukangan, Jakarta. Teknologi digital memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Semua materi pendidikan bisa terangkum dalam satu sentuhan gawai, seperti buku digital atau *e-book*.

Media Indonesia, 28 Desember 2023

Campur tangan teknologi pada proses pembelajaran ternyata tidak semuanya manis.

M Iqbal Al Machmudi
m.iqbal@mediaindonesia.com

TEKNOLOGI digital memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Materi pendidikan semua bisa terangkum dalam satu sentuhan gawai seperti buku digital atau *e-book* atau yang kini akrab disebut *interactive books*.

Interactive books dirancang untuk menarik partisipasi siswa agar menjadi pembaca aktif melalui tautan atau sebagainya. Namun, sayangnya di balik kemajuan teknologi di penjuru dunia ada kelemahan tersendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Anne Mangen dari Norway's Stavanger University pada 2014 lalu yang ternyata sangat relevan di era saat ini. Campur tangan teknologi pada proses pembelajaran ternyata tidak semuanya manis. Terdapat kelemahan yang ternyata berpengaruh pada daya serap ilmu oleh para siswa terutama saat mengandalkan *e-book* pada gawai. Selain itu, pembaca dengan media buku lebih mudah untuk mengingat termasuk dalam koherensi narasi dibanding yang mengandalkan *e-book*.

Pada studi tersebut juga dilakukan penelitian pada 72 siswa di Norwegia yang menemukan bahwa siswa yang membaca teks dalam bentuk cetak/buku mendapat pemahaman bacaan yang jauh lebih baik dibandingkan siswa yang membaca teks secara digital.

Pengamat pendidikan, Indra Charismiadji, menilai bahwa teknologi digital dalam sektor pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah alat yang digunakan untuk pembelajaran, penilaian, dan sebagainya.

"Kalau dibandingkan dengan buku yang dicetak ya, saya analogikan seperti nasi ditanak pakai *rice cooker* dengan ditanak pakai dandang, pasti lebih enak yang tradisional. Poin saya setiap perubahan teknologi, kita akan mendapatkan sesuatu sekaligus kehilangan sesuatu sehingga tidak bisa dihitung kurang atau lebih karena pada dasarnya digitalisasi itu alat kerja di era saat ini," kata Indra saat dihubungi, Selasa (26/12).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri yang menilai bahwa pembelajaran menggunakan buku cetak masih lebih efektif untuk menangkap materi bahan ajar dibandingkan dengan gawai. Menurutnya, gawai banyak digunakan anak sebagai sarana hiburan bukan untuk menangkap materi serius.

"Buku cetak masih lebih efektif. Pertama, tatap layar *e-book* punya persoalan kesehatan. Hanya sebagian kecil orang yang memiliki *kindley* sementara kebanyakan membaca di gadget atau tablet yang memiliki fungsi lain sehingga terjadi distraksi akibat notifikasi. Kemudian membaca tidak maksimal," ujar Iman.

Ia juga membandingkan dengan siswa dulu dan saat ini. Menurutnya, siswa zaman dulu lebih produktif dalam membaca karena memiliki waktu luang tanpa gangguan yang bisa dioptimalkan untuk membaca atau membedah sebuah buku. Sementara siswa zaman sekarang kurang dalam hal waktu membaca namun lebih mahir menggunakan gawai dibandingkan dengan siswa-siswa sebelumnya.

"Pelajar siswa sekarang dan dulu jauh berbeda. Dulu sulit bagi siswa menggunakan keterampilan digital dalam mengerjakan tugas. Namun, mereka punya banyak waktu lebih untuk membaca tanpa gangguan," kata Iman.

Selain itu, siswa sekarang juga jauh lebih tangkas mengerjakan tugas dengan keterampilan digital, tetapi kemampuan membaca mereka dinilai kurang baik. Mereka sulit berkonsentrasi serta kesulitan untuk membaca teks-teks yang mendalam sehingga materi yang diserap tidak lengkap sehingga informasi yang diserap pun tidak utuh. Siswa zaman sekarang hanya membaca melalui media sosial saja. Alhasil materi yang disampaikan tidak lengkap.

"Pengecualian bagi pelajar yang tinggal di asrama dan tidak mengakses gadget/gawai. Mereka memiliki kesempatan membaca lebih baik pada generasi sekarang. Pelarangan gadget di sekolah dari rekomendasi UNESCO perlu dipertimbangkan. Minimal dikontrol," ungkapnya.

Diketahui menurut Laporan Pemantauan Pendidikan Global UNESCO 2023, tiga tantangan paling penting dalam pendidikan saat ini ialah kesetaraan dan inklusi, kualitas, serta efisiensi. Sementara analisis Oliver Wyman menunjukkan tanda-tanda positif peningkatan efisiensi, serta perubahan pola pikir dan perilaku di kalangan pelaku pendidikan.

Media Indonesia, 28 Desember 2023

Pengaruh Teknologi dalam Pendidikan

Peran E-book dalam Pembelajaran

- Menarik minat, motivasi, dan rasa ingin tahu siswa melalui fitur yang termuat di dalamnya.
- Proses pembelajaran menjadi lebih efisien.
- Membantu pendidik dalam menyajikan informasi.

- Akses ke sumber daya lebih mudah dan cepat.
- Komunikasi yang lebih efisien.
- Kolaborasi antarsiswa.
- Pembelajaran jarak jauh.
- Personalisasi pembelajaran.
- Penilaian yang lebih.

Pengaruh Pembelajaran dengan E-Book

Penelitian Anne Mangen dari Norways Stavanger University

- Pembaca konservatif dengan media lebih mudah untuk mengingat termasuk dalam koherensi narasi jika dibandingkan dengan mengandalkan *e-book*.
- Siswa yang membaca teks mendapat pemahaman bacaan jauh lebih baik.

Alasan Membaca Buku Lebih Baik daripada E-Book

- *E-book* dapat menurunkan pemahaman bacaan.
- *E-book* dapat menimbulkan gangguan ketika membaca.
- *E-book* menimbulkan kerancuan dalam alur cerita.

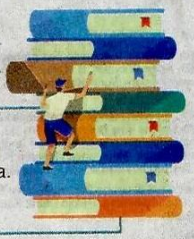

Upaya Meningkatkan Minat Baca pada Siswa

- Menumbuhkan kebiasaan dan semangat membaca dari diri sendiri.
- Membagikan informasi mengenai buku yang telah dibaca.
- Mengadakan sesi membaca buku di sekolah.
- Melakukan proses belajar di perpustakaan sekolah.

Sumber: Kemendikbud-Ristek/Litbang MI

"Teknologi sangat mempengaruhi guru. Guru ada di semua platform digital. Media sosial dan berbagai aplikasi penunjang pembelajaran. Gaya mengajar juga beragam hanya banyak yang menganggap setiap anak harus dibagi menjadi beberapa gaya belajar yang tepat mungkin keberagaman model dan metode," jelas Imam.

Minat baca

Sebelumnya Kemendikbud-Ristek mengupayakan untuk implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang PAUD untuk menumbuh kembangkan minat anak terhadap buku bacaan. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbud-Ristek, Anindito Aditomo menjelaskan di usia PAUD pembelajaran bisa melalui permainan, dan literasi buku. Secara implementasi, anak tidak dipaksa untuk membaca, tetapi dikenalkan dunia buku yang menyenangkan guna menstimulasi imajinasi.

"Jadi dalam Kurikulum Merdeka, pondasi literasi yang dibangun melalui kesukaan pada dunia buku dan dunia bacaan itu sudah perlu dikuatkan sejak PAUD. Tidak masalah apakah anak sudah bisa membaca secara mandiri atau tidak karena hal tersebut tidak menjadi syarat untuk masuk ke SD," ungkapnya.

Untuk meningkatkan minat baca buku pada peserta didik, Kemendikbud-Ristek juga menerbitkan kebijakan perjenjangan buku. Perjenjangan buku merupakan upaya untuk memberikan bahan-bahan bacaan yang disesuaikan dengan tahap kemampuan, perkembangan, dan minat sekaligus memastikan pembaca menikmati isi buku dengan baik.

Terdapat dua karakteristik buku yang dimuat dalam perjenjangan buku, yakni buku ramah cerna (*decodable book*) dan buku berjenjang (*leveled book*). Kebijakan ini juga memuat lima tingkat klasifikasi yang dimulai dari jenjang A untuk pembaca dini, hingga jenjang bagi untuk pembaca mahir.

Pada saat pandemi covid-19 menghantam dunia semua sektor ikut bergejolak termasuk sektor pendidikan yang mengakibatkan tidak optimalnya pembelajaran. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan menggunakan teknologi digital seperti *Zoom*, *Gmeets*, dan sebagainya hingga tugas dan ujian pun beralih secara daring.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemenkdikbud-Ristek Iwan Syahril menyebut pemulihan pendidikan di Indonesia pascapandemi covid-19 lebih cepat.

"Jadi, itu yang menurut saya menjadi kabar menggembirakan karena kita punya sistem yang lebih resilien dan keputusan-keputusan yang kita ambil selama masa pandemi itu kemudian sesudahnya itu membuat kita menjadi negara yang *recovery* lebih cepat," kata Iwan.

Momentum tersebut perlu dijaga agar pemulihan pendidikan jauh lebih cepat dan kembali meningkat. Diketahui peringkat Indonesia di Program Penilaian Pelajar Internasional (Programme for International Student Assessment/ PISA) 2022.

Selanjutnya, momentum tersebut perlu dijaga agar pemulihan pendidikan jauh lebih cepat dan kembali meningkat. Diketahui peringkat Indonesia di PISA 2022 naik sekitar 5 sampai dengan 6 posisi dibandingkan 2018 mulai kategori literasi matematika, membaca, hingga sains.

"Momentumnya harus kita jaga supaya yang sudah bagus ini, *rebounding*-nya lebih cepat, jadi kita lebih sedikit *learning loss*-nya dibandingkan dengan banyak negara lain itu momennya bisa lebih banyak ke atas," pungkasnya. (H-3)

Posisi PISA Indonesia Naik 5 Peringkat

DI tengah suasana *learning loss* akibat dampak pandemi covid-19 yang dialami seluruh negara di dunia, peringkat Indonesia di Program Penilaian Pelajar Internasional (Programme for International Student Assessment/PISA) 2022 naik 5 posisi.

Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim di acara Perilisan Hasil PISA 2022, di Jakarta, kemarin.

"Kita melakukan analisis *learning loss* dan membandingkan dengan negara lain. Alhamdulillah peringkat Indonesia di PISA 2022 naik sekitar 5 sampai dengan 6 posisi jika dibandingkan 2018. Tentu ini kabar yang menggembirakan karena kita melihat bahwa dampak dari pada pandemi dan *learning loss* di Indonesia pemulihannya itu jauh lebih cepat dari rata-rata dunia," ujar Nadiem.

Kategori literasi membaca peringkat Indonesia naik 5 posisi jika dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian skor literasi membaca dibandingkan rata-rata dunia yang turun 18 poin, Indonesia hanya turun 12 poin. Jadi secara signifikan lebih baik daripada rata-rata internasional.

"Benar-benar sekitar 80% lebih dari negara peserta PISA mengalami penurunan skor pada literasi membaca jika dibandingkan PISA 2018. Jadi, ini suatu hal yang dihadapi seluruh dunia tapi Indonesia di atas rata-rata dari sisi penurunannya tidak separah rata-rata dunia," katanya.

Sementara kategori literasi matematika atau numerasi peringkat Indonesia juga naik 5 posisi dibandingkan di 2018. Secara umum di seluruh dunia skor literasi matematika internasional turun 21 poin tetapi di Indonesia hanya turun 13 poin.

Data PISA 2022 tersebut diambil pada Mei sampai Juni 2022 atau tepat setelah pandemi covid-19. Di Indonesia para siswa belajar dari rumah sekitar 8 bulan dan 17 bulan pembelajaran tatap muka terbatas. Baru pada April 2022 pembelajaran tatap muka benar-benar 100 persen.

Dalam paparan penelitian yang dilakukan SMERU Research Institute di Bukittinggi, Sumatra Barat menyebutkan pelibatan 67 guru honor lulusan S-1 yang mengajar di tingkat SD ternyata cukup berpengaruh pada numerasi pada siswa kemampuan rendah.

"Guru dengan kemampuan sangat baik akan meningkatkan skor numerasi siswa kemampuan rendah lebih besar. Ini juga menunjukkan bahwa perbedaan pengajaran itu juga sangat penting," papar Peneliti Senior SMERU Research Institute Asri Yusrina. (Iam/H-1)

Media Indonesia, 6 Desember 2023

MI/SUMARYANTO BRONTO

Standar Ganda Kenaikan Skor PISA Indonesia

HASIL skor Indonesia pada Programme for International Student Assessment atau Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) 2022 telah menunjukkan angka penurunan. Hal itu mencerminkan krisis pembelajaran di Indonesia yang semakin buruk dan harus segera diatasi secara serius serta berkelanjutan.

Sayangnya, pemerintah justru menutupi beberapa fakta terkait dengan hasil data PISA tersebut dan membuat suatu narasi bahwa seolah-olah kondisi pembelajaran sudah relatif baik karena adanya penurunan skor di bawah rata-rata internasional dan kenaikan peringkat 5-6 posisi dari 2018.

Praktisi pendidikan dan Pengawas Yayasan Penggerak Indonesia Cerdas (Pengincer), Dhitta Puti Sarasvati, mengatakan pemerintah harus transparan dalam memberikan informasi tentang hasil PISA secara menyeluruh dan tidak menutupi sebagian data lainnya serta memberikan narasi yang keliru.

"Saya cukup kaget dengan narasi yang dinyatakan pemerintah. Padahal, rata-rata penurunan skor dunia adalah 18 poin, sedangkan Indonesia secara menyeluruh mengalami penurunan 12-13 poin. Lalu ini dianggap sebagai prestasi dan keberhasilan. Ini seperti membodohi rakyat sendiri karena faktanya mutu pendidikan turun," jelasnya dalam diskusi publik di Jakarta, kemarin, bertajuk PISA dan Janji Mencerdaskan Bangsa.

Dengan mengacu pada hasil survei PISA pada Selasa (5/12) yang dirancang Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD), secara global skor kemampuan matematika, membaca, dan sains siswa berumur 15 tahun di 81 negara tercatat turun, termasuk di Indonesia.

Penilaian PISA itu terkait dengan kemampuan matematika, membaca, dan sains di kalangan siswa. Dhitta menjelaskan dalam laporan PISA tersebut yang memiliki tingkat level 1-6, rata-rata hanya ada 18% siswa yang berhasil mencapai level 2 pada kategori matematika. Data di negara lain menunjukkan rata-rata berkisar di angka 69%.

Selain itu, Dhitta mengatakan tak ada satu pun pelajar Indonesia yang disurvei dalam laporan PISA berada pada level 5-6. Sebaliknya, negara-negara seperti Makau, Tiongkok, Jepang, dan Estonia berhasil membawa 85% siswa mereka pada level di atas 2.

"Sayangnya, pemerintah tidak menampilkan hasil data tersebut. Artinya seolah-olah data itu ditutup-tutupi dan justru membuat narasi seolah pendidikan sudah baik dan meningkat," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia harus berdasarkan pada keseimbangan tiga sentra, tidak hanya dilimpahkan kepada pihak sekolah, tetapi juga para orangtua dan masyarakat mesti turut aktif mendidik anak-anak.

"Urusan pendidikan sejatinya sesuai dengan slogan KH Dewantara yang berpacu pada ada tiga sentra, yakni pendidikan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Rumah sebagai sentra pendidikan, pergerakan pemuda atau masyarakat sebagai sentra pendidikan, dan sekolah sebagai sentra pendidikan. Tiga ini harus seimbang," ujarnya. (Dev/H-3)

Media Indonesia, 11 Desember 2023

Puisi Zaman Keraguan

Yudi Latif
Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Menjelang kematiannya pada 1873, pujangga agung Keraton Surakarta, R Ng Ranggawarsita, menulis puisi ratapan, "Serat Kalatidha" (Puisi Jaman Keraguan).

Bait pertama puisi itu bersaksi, "*Kilau derajat neraga lenyap dari pandangan. Dalam puing-puing ajaran kebajikan dan ketiadaan teladan. Para cerdik pandai terbawa arus jaman keraguan. Segala hal makin gelap. Dunia tenggelam dalam kesuraman*".

Seperti *deja vu*, gambaran serupa membayangi pusat kekuasaan Negara Republik Indonesia yang mencapai titik zenitnya di pengujung masa kepresidenan Joko Widodo. Seorang putra Surakarta dari kalangan kawula yang, karena sepak terjangnya yang berbeda dari kebanyakan politisi, melesat cepat menjadi presiden dengan gelembung harapan rakyat nyaris seperti ratu adil. Namun, menjelang akhir masa bakti, gelembung harapan itu mengempis, mengembuskan awan keraguan dan ketidakpercayaan.

Pada bait kedua, diinsyafi bahwa kesuraman negara itu bukan karena ketiadaan orang baik dan cerdik. "Rajanya sendiri termasuk orang baik, patihnya juga cerdik, semua anak buahnya berhati baik, para pemuka masyarakat juga baik".

Namun, "segalanya itu tidak menciptakan kebaikan". Meminjam ungkapan John Kane (2001), kebaikan dan kecerdikan perseorangan itu tidak menjamin kebajikan dan rasionalitas politik (kolektif) sejauh tidak ditransformasikan menjadi *moral capital*.

Moral dalam arti ini adalah kekuatan dan kualitas komitmen aktor/institusi politik dalam memperjuangkan nilai-nilai, tujuan, dan kepentingan publik. Kapital, bukan sekadar potensi kebajikan yang dimiliki seseorang, melainkan potensi yang bisa menggerakkan (roda politik). Artinya, yang dikehendaki bukan sekadar kualitas moral individual, melainkan juga kemampuan untuk menginvestasikan potensi kebajikan perseorangan itu ke dalam mekanisme politik yang bisa memengaruhi tingkah laku masyarakat.

Kesuraman saat ini situasinya lebih pelik. Bukan saja ditimbulkan oleh defisit *moral capital*, melainkan juga oleh defisit orang baik dan benar. Jokowi tak berdiri sendirian. Ia representasi arus besar anti-intelektualisme dan dekadensi moral di tengah masyarakat. Ke mana pun kita menghadap, di semua pihak-kandidat, dengan mudah kita kenali orang cacat nalar dan moral memainkan peran penting.

Zaman keraguan saat ini terjadi karena kita cenderung mengabaikan api dan air kebajikan-keselamatan publik. Apinya adalah nalar yang sehat, airnya moral terpuji. Tanpa nalar dan moral, negara kehilangan obor-perjalanan dan sumur keberlangsungan kehidupan.

Kesenangan bisa diperoleh dari kemenangan pemilihan, kenaikan kedudukan dan pendapatan, peningkatan popularitas dan pengikut, pelipatgandaan profit dan aset. Namun, kesenangan tak kenal kata cukup. Kebahagiaan abadi hanya bisa diraih dengan mengembangkan jiwa dan pikiran dengan tujuan moral yang membuat kita bisa hidup dengan kehidupan yang baik. Aristoteles dalam uraian tentang kebahagiaan (*eudaimonia*) menjelaskan, sesuatu dikatakan baik jika memenuhi tujuannya.

Manusia baik adalah yang mampu bertindak seusai dengan nalar yang benar. Keunikan manusia sebagai makhluk karena kapasitasnya untuk bernalar, dan menggunakan nalar itu untuk menginvestigasi alam dan tujuan keberadaannya di alam. Dengan demikian, kita bisa menghidupi kehidupan yang baik tatkala mampu menemukan tujuan moral dalam mengembangkan nalar yang benar serta menggunakan nalar itu untuk bertindak secara bajik (*virtues*).

Krisis nalar

Perkembangan demokrasi Indonesia justru seperti mengenakan baju secara terbalik. Praktik demokrasi yang mestinya menghargai meritokrasi dan mutu deliberasi berbasis prestasi dan kekuatan artikulasi-argumentasi yang rasional justru dirayakan dengan defisit pencapaian dan penalaran. Krisis pencapaian dan penalaran itu tampak dalam sosok dan produk lembaga kepartaian, kenegaraan, birokrasi pemerintahan, dan kandidat pemimpin politik.

Nalar sehat sulit menerima kenyataan bahwa pejabat BPK justru jadi instrumen "penggelapan" keuangan negara, pejabat MK jadi fasilitator manipulasi nalar hukum dan nalar etik, pejabat KPK menjadi agen pemerasan dan gratifikasi, pejabat Kementerian Polhukam justru jadi pemburu rente bidang hukum. Krisis nalar kenegaraan juga terlihat nyata dalam nalar konstitusi pascaperubahan. Banyak lembaga negara baru muncul, seperti DPD, tanpa fungsi yang jelas.

Dalam UUD 1945, yang semula disusun dengan sistematis negara kekeluargaan, diselundupkan paham individualisme tanpa koherensi. Dalam rancangan asli, presiden tak diberi kewenangan menentukan haluan dan kebijakan dasar pembangunan.

Di negara kekeluargaan, hal-hal penting menyangkut filosofi dasar, hukum dasar, dan haluan-kebijakan dasar dirumuskan secara musyawarah-mufakat seluruh representasi kekuatan rakyat di MPR. Untuk melaksanakan haluan dan kebijakan dasar itu, MPR mendelegasikan kepada dua mandataris: presiden sebagai pelaksana dan DPR sebagai pengawas.

Untuk itu, DPR dan presiden diberi kewenangan menyusun aturan permainan yang disepakati bersama berupa UU. Setelah perubahan konstitusi, peran MPR dilucuti, dengan memberikan peran terlalu besar kepada presiden untuk mengemban politik negara: ikut menyusun UU (bahkan perppu), APBN, dan "haluan negara". Tanpa jiwa kenegarawanan kuat, seorang presiden dengan kewenangan yang begitu besar bisa mudah tergelincir ke dalam tirani.

Perkembangan demokrasi tanpa nalar sehat juga membawa arus balik nepotisme. Nepotisme, perlakuan istimewa tanpa rasionalitas terhadap suatu keluarga, menistakan jati diri bangsa dan nilai-nilai demokrasi. Karakter keindonesiaan dibangun melalui semangat antifeodalisme dan antikolonialisme.

Menulis di *Bintang Hindia* No 1/1902, Abdul Rivai memancangkan tonggak perlawanan atas nepotisme. "Tak perlu memperpanjang perbincangan kita mengenai 'bangsawan *oesoel*' karena kemunculannya memang telah ditakdirkan. Jika nenek moyang kita bangsawan, kita pun bisa disebut sebagai bangsawan, bahkan meskipun pengetahuan dan pencapaian kita tak ubahnya seperti 'katak dalam tempurung'. Saat ini pengetahuan dan pencapaianlah yang menentukan posisi seseorang. Inilah situasi yang melahirkan munculnya bangsawan pikiran".

Dalam konteks nilai demokrasi, nepotisme juga melanggar kesamaan hak warga negara yang menuntut prinsip *fair play* dan meritokrasi di politik. Bahwa posisi seseorang tak ditentukan oleh hereditas, tapi oleh pengetahuan, pengalaman, kreativitas, dan prestasinya.

Seseorang yang terlahir dari dinasti politik mendapat keuntungan modal sosial dan kultural, berupa proses familiarisasi lebih dini dengan "bahasa" dan pergaulan politik, serta pengenalan publik yang lebih baik karena asosiasinya dengan keluarga-keluarga terkenal. Modal-modal ini memudahkan mereka terjun ke dalam dunia politik.

Meski demikian, fakta keberuntungan itu tak boleh menafikan prinsip-prinsip *fair play* dan meritokrasi. Siapa pun, dari keluarga mana pun, harus sama-sama mengikuti proses pengaderan dan menapaki jenjang posisi politik menurut ukuran-ukuran prestasi.

Gelombang pasang nepotisme dalam bentuk penguatan dinasti politik di Indonesia saat ini sebagian merupakan cermin lemahnya penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagian lain bisa dipandang sebagai "puncak gunung es" dari meluasnya kesenjangan sosial di masyarakat.

Perkembangan demokratisasi politik tak diikuti oleh proses demokratisasi di bidang ekonomi. Paul Krugman dalam *The Conscience of a Liberal* (2007) menyatakan, kesenjangan sosial yang lebar, menyusul dominasi pemerintahan konservatif yang mengusung neoliberalisme, merupakan katalis gelombang pasang politik partisan dan politik pengultusan, dalam bentuk nepotisme ataupun fanatisme keagamaan dan etnosentrisme.

Krisis moral

Krisis nalar publik itu berkelindan dengan krisis moral publik. Krisis moral itu tecermin dalam bahasa politik dominan. Dunia politik kita cuma memedulikan dua pertanyaan penting: bagaimana/siapa yang menang dan apa untungnya.

Nyaris tak dipersoalkan apa/siapa yang benar. Politik sebagai teknik mengalami pencanggihan, tapi politik sebagai etik mengalami kemunduran. Padahal, dalam demokrasi beradab, hukum berenang di lautan etika sehingga defisit UU selalu bisa ditutupi oleh kecukupan moralitas. Dalam demokrasi tuna-adab, surplus UU tak membuat tertib hukum, malah semakin membuka peluang bagi aksi-aksi kejahatan manipulasi hukum.

Tak ada yang lebih sempurna menggambarkan krisis etika politik ini seperti musibah yang menimpa MK. Para hakim konstitusi mestinya sadar benar akan sebuah diktum yang menyatakan bahwa "tidak ada konstitusi tanpa moral".

Diktum inilah yang melandasi pernyataan Prof Soepomo di akhir penjelasannya tentang Rancangan UUD 1945. "Segala sistem ada baik dan jeleknya, ... sistem mana saja tidak sempurna". Lantas ia tekankan, apa pun rancangan konstitusi Indonesia, untuk kesempurnaannya sangat ditentukan oleh semangat moral penyelenggara negara.

Bahwa "yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun kita membikin undang-undang yang menurut ka-

ta-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, undang-undang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktik".

Ada tiga lingkungan tradisi budaya yang membentuk sikap etis penyelenggara negara dan warga negara. Pertama, budaya rasa bersalah (*guilt culture*). Dalam budaya ini, sikap etis seseorang merupakan pancaran kekuatan lentera moral dalam dirinya, yang senantiasa menimbang baik-buruk laku hidupnya.

Di sini, orang berbuat etis bukan karena taat hukum atau pandangan orang lain, melainkan karena sensitivitas etis sebagai buah olah jiwa pelatihan kebajikan praktis (*phronesis*) yang disebut Aristoteles sebagai *arete* (*excellence in virtues*; hebat dalam karakter).

Kedua, budaya malu (*shame culture*). Dalam budaya ini, sikap etis seseorang ditentukan pertimbangan daya takarnya tentang penilaian orang lain, yang bisa menimbulkan rasa malu jika dipergunjingkan dan dinistakan orang lain. Di sini, orang berbuat etis lebih ditentukan oleh penilaian eksternal dan sanksi sosial.

Ketiga, budaya takut (*fear culture*). Dalam budaya ini, sikap etis seseorang disebabkan rasa takut pada sanksi dan hukuman, di dunia ataupun akhirat.

Dari ketiga budaya etis itu, sepertinya saat ini tak satu pun yang tumbuh kuat di negeri ini. Rasa bersalah tumpul, rasa malu pudar, rasa takut redup. Kita mengalami krisis kehidupan publik yang akut karena seluruh sistem pertahanan budaya untuk mengembangkan masyarakat etis tak dapat dipertahankan.

Apa yang harus dilakukan

Semua itu terjadi karena kita tak bisa belajar dari sisi-sisi baik dan sisi gelap dari masa lalu. Sebuah bangsa yang tidak bisa melihat sisi-sisi terang dari masa lalu tidak memiliki jangkar untuk menambatkan visi masa depan.

Menengok masa lalu, kita bisa melihat bahwa gerakan kebangkitan nasional dimulai dari pencerahan nalar-ajar dan keutamaan budi, lewat kepeloporan kaum guru, gerakan Budi Utomo dan sejenisnya. Manakala kini, "bangsawan pikiran" kembali direndahkan oleh "bangsawan keturunan", budi pekerti dikalahkan oleh kekuatan logistik, jalan kebudayaan harus kembali memimpin.

Gerakan kebudayaan ini sangat penting untuk melakukan koreksi terhadap kecenderungan menjadikan politik dan ekonomi sebagai panglima. Dalam teori sosial konvensional, responsibilitas untuk perubahan biasanya dialamatkan pada faktor-faktor semacam modernisasi, kapitalisme, arus investasi, atau figur karismatis. Ini mengabaikan kenyataan bahwa reformasi sosial tak akan pernah muncul hanya mengandalkan reformasi politik dan ekonomi, melainkan perlu berjejak pada reformasi sosial-budaya.

Gerakan kebudayaan merupakan jantung dari reformasi sosial. Reformasi sosial merupakan fungsi dari perubahan proses belajar sosial secara kolektif, yang membawa transformasi tata nilai, ide dan jalan hidup (*ways of life*). Dalam centang-perenang jagat politik dan ekonomi, gerakan kebudayaan menjadi alternatif menjaga kewarasan publik.

Dunia pendidikan harus menjadi wahana pembudayaan sikap kritis dan kepekaan etis, dengan menempatkan literasi nalar dan literasi moral di jantung kurikulum. Kita juga harus memperluas ruang-ruang perjumpaan dan ruang kreatif melalui wahana kesusastraan, kesenian dan spiritualitas yang dapat menyuburkan nalar kritis dan nalar etis. Pengadopsian *high tech* harus sejalan dengan *high touch*. Jalan kebudayaan harus memimpin jalan politik dan ekonomi.

Kompas, 6 Desember 2023

Melantunkan Puisi dengan Bermusik

Mengenalkan puisi lewat jalur musik menjadi bukti karya seni itu tidak kaku dan kuno serta bisa ditampilkan dengan kemasan kekinian.

Rifaldi Putra Irianto
rifaldi@mediaindonesia.com

MINIMNYA minat anak-anak muda Indonesia pada dunia sastra, khususnya puisi, membuat sekelompok siswa-siswi SMA Negeri 12 Jakarta berupaya menyajikan dalam bentuk yang lebih menarik. Ya, mereka yang tergabung dalam grup Twics berupaya membawakan puisi yang dipadukan dengan musik.

Grup Twics awalnya dibentuk pada 2018 ditujukan untuk mengikuti lomba musikalisasi puisi yang diadakan Badan Bahasa pada Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud-Ristek). Karena beranggotakan siswa-siswi SMA Negeri 12 Jakarta, setiap tahun personelnya pun berganti.

Saat ini, Twics beranggotakan 7 personel, yakni Sofia Maria Greata (*vocalist*), Muhammad Calvin Amikonaka (*bassist*), Kanya Arishanti (*traditional instrument player*), Pradnya Ayudya (*pianist*), Dio Adisty (*percussion*), Annisa Jasmine dan Venno Alviandra (*guitarist*). Mereka sudah melahirkan sekitar tujuh karya musikalisasi puisi selama kurang lebih dua tahun terakhir.

Ditemui di ruang latihan yang terletak di SMA Negeri 12 Jakarta, Ketua Twics Calvin (18) mengungkapkan musikalisasi puisi ialah hal yang indah dengan paduan aransemen musik yang unik dan syair-syair puisi yang menyimpan makna.

"Saat tampil, secara enggak langsung kami memperkenalkan puisi. Puisi itu enggak cuma bisa *dibacain*, tapi juga bisa di aransemen, bisa dijadikan musik juga. Jadi sekalian kami memperkenalkan puisi, di sisi lain *banggain* sekolah juga," kata Calvin, Rabu (6/12).

Sederet penampilan musikalisasi puisi telah dilakukan Calvin dan kawan-kawan dalam beberapa waktu terakhir. Terbaru, mereka berhasil meraih juara harapan 2 pada festival musik *band* yang digelar Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur. Mereka juga berkesempatan tampil di acara Festival Bahasa dan Sastra yang digelar *Media Indonesia*, beberapa waktu lalu.

Calvin menceritakan proses memadukan puisi dengan musik, rata-rata membutuhkan waktu sekitar 3-7 hari. Salah satu puisi yang paling berkesan bagi grupnya, yakni Sebuah Kota karya Ahda Imran. Puisi tersebut memiliki aransemen yang indah, pun ada cerita di balik proses pembuatannya.

"Jadi karya *Sebuah Kota* itu dibuat untuk mengikuti lomba Bulan Bahasa. Kami mengambil video di studio dan itu dipaksakan selesai dalam waktu satu hari. Selama proses pembuatan video, kami sampai enggak sempat makan dan istirahat. Jadi pas selesai pembuatan video, kami semua mutah-muntah. Menurut saya, hal itu paling berkesan," ungkapnya.

Membuat aransemen dan memilih puisi

Salah satu tantangan tersulit yang dihadapi Twics ketika proses menyatukan ide yang datang dari tujuh kepala. Calvin mengaku setiap personel kerap dituntut

• Pertunjukan musikalisasi puisi siswa-siswi SMA Negeri 12 Jakarta di panggung Festival Bahasa dan Sastra di Kompleks Kantor Media Group di Jakarta, Jumat (27/10).

DOK TWICS

• Grup Twics saat meraih juara harapan 2 pada festival musik *band* yang digelar Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur.

menurunkan ego demi karya yang harmonis dan indah didengar. Untungnya, sekitar satu tahun terakhir ini, mereka memiliki pelatih yang membantu dalam proses melakukan aransemen.

Dalam proses pembuatan aransemen, Twics biasanya mencari *chord* secara bersama antara gitar, bass, dan piano. Setelah menemukan yang pas, mereka melakukan *improve* untuk setiap alat musik lalu dipermanis dengan alat musik pendukung seperti angklung hingga alat musik buatan sendiri guna menghadirkan suara yang lebih spesifik, misalnya seperti suara laut.

"Untuk pemilihan puisi, kadang saya suka tiba-tiba yang *nentuin* puisi apa yang mau dibawakan, tapi kadang juga direm-buk," tuturnya.

Dengan Hadirnya Twics, Calvin yang saat ini duduk di kelas 12, berharap puisi semakin bisa dinikmati anak-anak muda. Memperkenalkan lewat jalur musik menjadi bukti puisi itu tidak kaku dan kuno serta bisa ditampilkan dengan kekinian.

Ritual makan kencur

Sofia, 16, vokalis grup Twics, mengungkap ada ritual khusus yang dilakukan guna menjaga suara. Latihan dengan intensitas tinggi setiap akan tampil terkadang membuat suaranya habis karena itu ia mengonsumsi kencur guna menjaga pita suaranya.

"Kalau latihan itu bisa berkali-kali dan suara bisa habis. Biar suara enggak habis, saya makan kencur," ucap Sofia yang sebelumnya justru bergabung dengan grup paduan suara.

Perempuan kelas 11 itu menceritakan keikutsertaannya dengan Twics lantaran menjadi pengganti ketika vokalis grup sakit.

"Mereka *ngedengerin* suara aku nyanyi dan semenjak itu aku ikut-ikut lomba bareng Twics dan memutuskan masuk

OPINI MUDA

Nabila Rahma, 16 Tahun
SMA 110 Jakarta Utara

Kegiatan musikalisasi puisi sangat bagus, membuat puisi tidak terlihat kuno, lebih kekinian. Ternyata puisi jika digabungkan dengan musik dan menjadi musikalisasi lebih seru dan tidak membosankan.
Saya pribadi melihat sekarang ini puisi kurang diminati karena mungkin pelajar atau Gen Z lebih suka budaya luar seperti K-*pop*. Dengan musikalisasi, tentu bisa membuat puisi terjaga keberadaannya dan tidak ketinggalan zaman. (Rif/M-4)

Esita Tasbiliya, 18 Tahun
Universitas Singaperbangsa Karawang-
Ilmu Politik

Bagi saya, musikalisasi puisi merupakan hal bagus untuk anak-anak muda sekarang. Apalagi, dari segi puisinya, zaman sekarang puisi itu mulai meredup dan kurang banyak diminati. Jadi, menurut saya, kegiatan musikalisasi puisi sangat positif sebagai upaya meningkatkan minat orang-orang terhadap puisi. Kegiatan itu juga jadi inovasi baru untuk menarik minat anak-anak muda terhadap puisi, lebih mudah

Twics," ungkap Sofia yang memang menyukai dunia tarik suara sejak kecil.

Alat musik tradisional dan buatan tangan

Salah satu yang menarik dari grup Twics ialah penggunaan instrumen tradisional dan buatan tangan. Salah satu pemain instrumen tradisional di Twics, yakni Kanya Arishanti. Perempuan berusia 15 tahun itu memiliki tugas untuk mempermanis aransemen musik yang dominan seperti gitar, bass, dan piano.

Ketika tampil di Festival Bahasa dan Sastra *Media Indonesia*, Kanya memperlihatkan kemampuannya. Ia menyisipkan musik dari hasil getaran angklungnya. Di kesempatan lain, Kanya juga pernah menghadirkan bunyi-bunyian seperti suara ombak laut lewat alat musik *handmade* (buatan tangan).

"Jadi dari kecil suka *dengerin* nenek nyanyi, itu awal mula suka musik. Nenek *ngenalin* banyak alat musik hingga akhirnya saya bisa memainkan beberapa alat musik," ungkap Kanya.

Pun, Kanya mengungkap telah menekuni permainan angklung sejak kelas 9 melalui kegiatan ekstrakurikuler. Memasukkan instrumen angklung dalam musikalisasi puisi, kata Kanya, bukan hal mudah.

"Apalagi, angklung yang ada di sini itu terbatas dan enggak komplet, jadi aku harus cari nada yang mirip-mirip agar sesuai dengan aransemen," tukas anggota termuda di grup Twics. (M-4)

Eka Dalanta Rehulina

Membumikan Buku Sastra

Eka Dalanta Rehulina (39) ingin karya sastra dibaca semua orang. Sebab, selama ini buku sastra terkesan hanya dibaca kalangan terbatas. Lewat gerakan Ngobrol Buku, dia membumikan sastra.

Mohammad Hilmi Faiq

Saat ini Ngobrol Buku memasuki tahun keempat setelah berulang tahun ketiga pada Mei 2023. Gerakan yang muncul di masa pandemi ini semula lebih banyak menggelar acara secara daring. Belakangan sering juga dilaksanakan secara luring. Misalnya pada Sabtu (16/12/2023), gerakan yang diinisiasi Eka dan teman-temannya ini menggelar bedah buku bertajuk *Kopi dan Kepo* karya Hasan Al Banna di Ruang Multipurpose RRI Medan, Sumatera Utara.

Ngobrol Buku bermula dari obrolan antara dia dan dua rekannya sesama penyuka sastra, Juhendri Chaniago dan Alda Muhsi. Mereka ingin mendorong tumbuhnya diskusi-diskusi sastra, salah satunya memperbincangkan karya sastra. "Kami melihat diskusi-diskusi seperti itu masih kurang di Kota Medan. Apalagi yang menarget pembaca-pembaca muda," kata Eka yang kemudian mengajak serta Dian Nangin dan Titan Sadewo untuk berlima mendirikan Ngobrol Buku.

Gerakan ini bercita-cita memperkenalkan khazanah sastra Indonesia dan mengajak masyarakat menjadi lebih dekat dengan karya sastra.

Ketertarikan Eka pada sastra jadi embrio Ngobrol Buku. Apa pun latar belakang pendidikan keilmuannya, sastra penting dibaca. Apalagi buat anak-anak muda. Itu sebabnya Ngobrol Buku tidak hanya menghadirkan penulis dan mahasiswa sastra, tetapi juga berbagai latar belakang profesi.

Ngobrol Buku pertama kali menggelar diskusi pada 20 Mei 2020. Oleh karena masih masa pandemi, mereka menggelar acara dengan memanfaatkan media sosial Instagram @ngobrol.buku. Mereka memilih platform ini karena jangkauannya luas dan cocok dengan target, yakni pembaca-pembaca sastra muda. "Saat itu bulan Ramadhan, jadi Ngobrol Buku tahap awal ini diadakan sebelum waktu berbuka puasa. Obrolan pertama kami adalah *Bukan Pasar Malam* karya Pramoedya Ananta Toer. Pada tahap awal ini yang menjadi pemandu dan pembahas adalah para penggagas Ngobrol Buku, yang bertugas secara bergantian sembari kami mencari kawan bicara yang tepat dan bersedia," kata Eka.

Respons publik amat bagus karena dianggap sebagai sebuah kegiatan yang memberikan warna bagi perbincangan sastra Indonesia. Narasumber dan jejaring juga makin terbuka, baik dari penerbit maupun penulis, serta komunitas lainnya. Sekarang Ngobrol Buku dikenal lebih luas, termasuk komunitas pembaca di Indonesia, penerbit, dan para penulis.

Konsisten

Hingga saat ini Ngobrol Buku konsisten membicarakan sastra Indonesia. Tidak pernah absen sekali pun, kecuali pada hari libur keagamaan. Ngobrol Buku sudah membicarakan sekitar 190 judul buku sastra Indonesia. Sejak pandemi dinyatakan sudah berlalu dan pertemuan tatap muka diperbolehkan, Ngobrol Buku rutin melakukan diskusi secara luring sebulan sekali. "Ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk meminjamkan tempat atau ruangan baik itu museum, ruang kreatif, maupun *coffee shop-coffee shop* yang kami ajak bekerja sama. Contohnya acara di RRI tersebut," katanya.

Selain itu, Ngobrol Buku juga memberikan "darah" bagi tumbuhnya industri perbukuan di Medan. Penulis-penulis baru bermunculan dan karya-karyanya dibicarakan di Ngobrol Buku. "Sebab, sebuah karya sebaik apa pun, tanpa ada pembaca dan tanpa ada orang-orang yang membicarakannya, tidak tercapai tujuannya," kata Eka.

Kegiatan-kegiatan sastra lainnya pun semakin bergeliat. "Saya pikir Ngobrol Buku memiliki kontribusi mendorong tumbuhnya gairah bersastra dan berkegiatan," ujar Eka.

Pada perkembangan terakhir, Ngobrol Buku berkolaborasi dengan berbagai komunitas, termasuk mengadakan obrolan seputar isu sastra dan berkolaborasi menggelar pertunjukan sastra.

Sejak kecil

Duta Baca Kabupaten Karo (2023-2027) ini sejak kecil akrab dengan buku. Dia lahir sebagai bungsu dari lima bersaudara. Ayahnya seorang PNS di dinas pendidikan dan kebudayaan dan ibunya seorang pedagang. Ayahnya rajin membawakan buku-buku bacaan dan cerita anak.

Hampir setiap sore setelah pulang kerja dan anak-anak usai mandi, ayahnya mengajak membaca koran, lalu mendiskusikan isinya. Eka percaya, dari sanalah, kecintaan pada membaca tumbuh. Di samping itu, dia dan saudara-saudaranya kerap terpapar dongeng tradisional Karo dari neneknya, Nenek Tigan. Ini juga menjadi sebuah alas pijak literasi bagi Eka. Ditambah kegiatan sekolah Minggu yang menyuguhkan kisah-kisah Alkitab disertai gambar.

"Sejak sering dibawakan oleh bapak buku-buku cerita anak, saya merasa tidak cukup. Dengan uang jajan yang masih terbatas, saya membeli buku-buku yang saya suka dan ingin di toko buku kecil, satu-satunya di kampung kami. Tentu koleksi buku yang dijual juga sangat terbatas. Di pasar, saya sangat gembira menemukan satu ibu yang menjual buku-buku cerita bekas. Ke sanalah uang jajan saya kemudian banyak saya gunakan," papar Eka yang menghabiskan masa kecil di Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.

Saat kuliah, dia sangat aktif di pers mahasiswa sampai pernah menjadi pemimpin redaksi. Lalu, bersama teman kuliahnya, dia mendirikan Rumah Buku Medan yang bertahan selama tiga tahun. Eka kemudian bekerja di bidang penulisan sebelum memutuskan keluar dan menjadi penulis dan editor lepas. "Saya menulis naskah film dokumenter, buku untuk lembaga, media internal perusahaan, dan lain-lain," katanya.

Dia sempat rajin juga menulis di blog, sekarang sudah jarang. Ia menulis ulasan singkat di media sosial tentang buku-buku yang dibaca. Itu sebagai pengingat buku apa saja yang sudah dia baca berikut poin-poin pentingnya.

Nah, Ngobrol Buku menjadi ruang yang pas bagi Eka karena dia mencintai buku-buku dan merasa selalu punya teman saat bersama buku-buku.

ARSIP PRIBADI

Eka Dalanta Rehulina

Lahir: Medan, 1 April 1984
Pendidikan: Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara (S-1) (2008)
Aktivitas, antara lain: Koordinator Pena Lingkar Toba (2021-sekarang)

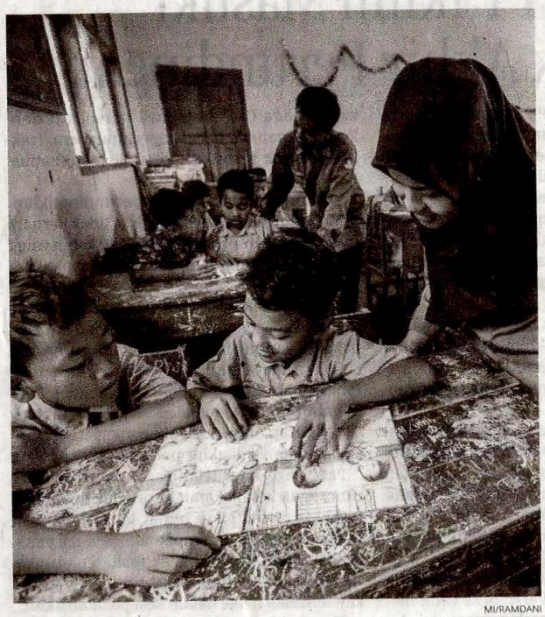

MI/RAMDANI

KAMPUS MENGAJAR: Mahasiswa dari Kampus Mengajar berkolaborasi dengan guru memberikan materi pembelajaran di SDN 06 Selabu, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, kemarin. Program Kampus Mengajar menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan pembelajaran, terutama pada masa pandemi covid-19, khususnya yang berada di wilayah 3T.

Menggugah Komunitas Sastra lewat Apresiasi

BADAN Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) melaksanakan pentas karya komunitas sastra penerima bantuan pemerintah bertajuk Sastra Perekat Kebinekaan. Kegiatan itu wujud bentuk *monitoring* dan evaluasi yang dilaksanakan Badan Bahasa sebagai tindak lanjut bantuan pemerintah yang diberikan kepada komunitas sastra pada 8 Juli lalu.

Kepala Badan Bahasa E Aminudin Aziz mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk lanjutan komitmen Badan Bahasa merealisasikan bantuan pemerintah itu agar menjadi bentuk penggugah kegiatan komunitas sastra.

"Tahun 2023 kita berikan bantuan kepada 45 komunitas sastra dan 34 apresiasi kepada maestro sastra. Semua penampil yang hadir merupakan perwakilan dari penerima apresiasi, ditambah undangan yang sengaja kita harapkan bisa menyaksikan karya komunitas sastra," ungkapnya dalam pembukaan Sastra Perekat Kebinekaan di Jakarta, kemarin.

Seperti diberitakan, bantuan pemerintah untuk komunitas sastra pada tahun ini mencapai sekitar Rp7 miliar. Tiap komunitas sastra berhak mendapatkan bantuan maksimal senilai Rp150 juta.

Amin menambahkan, sebagai bentuk komitmen Kemendikbud-Ristek kepada komunitas sastra, tahun depan volume bantuan pemerintah itu akan ditingkatkan dan kualitasnya diperbaiki. Sebanyak Rp28 miliar sudah dianggarkan untuk bantuan itu pada tahun depan.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikbud-Ristek Suharti menambahkan, pemerintah terus ingin mendukung pengembangan karya sastra di Indonesia melalui bantuan pemerintah untuk komunitas sastra.

"Pemerintah berikan bantuan, tapi tentu ada keterbatasan. Kita bukan negara kaya yang bisa berikan bantuan berlimpah. Tapi kami ingin bantuan itu bisa jadi pemantik untuk mendukung tidak hanya komunitas sastra, tapi juga semua untuk membantu pengembangan sastra di Indonesia," ujar Suharti. (Des/H-2)